

KAJIAN LIKUIDITAS OPERATOR TELEKOMUNIKASI DALAM PERSPEKTIF KERINGANAN PNBP:

**SEBUAH ANALISIS
BERDASARKAN PP
NO.59/2020**



**Siti Kurnia Rahayu
Ely Suhayati**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kajian : Kajian Likuiditas Operator Telekomunikasi dalam Perspektif Keringanan
PNBP: Sebuah Analisis Berdasarkan PP No.59/2020
Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Ekonomi, Akuntansi
Skema : Riset Anggaran Dana Kominfo

Ketua Periset:

a) Nama Lengkap : Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA
b) NIDN : 0014087401
c) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d) Program Studi : Akuntansi
e) Nomor HP : 081394699986
f) Alamat surel (e-mail) : siti.kurnia@email.unikom.ac.id

Anggota:

a) Nama Lengkap : Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA
b) NIDN : 0422077101
c) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d) Program Studi : Akuntansi
e) Nomor HP : 08156244693
f) Alamat surel (e-mail) : ely.suhayati@email.unikom.ac.id

Anggaran : Rp. 18.360.000,-



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Assoc. Prof. Dr. Ely Suhayati, SE., M. Si., Ak., CA
NIP. 4127.34.03.006

Bandung, 15 November 2022
Ketua Periset

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA
NIP. 4127.34.03.015

Menyetujui,
Direktur Penelitian, Pengabdian dan
Pemberdayaan Masyarakat (DP3M) UNIKOM



Dr. Wendi Zarman, M.Si
NIP. 4127.70.05.010

KATA PENGANTAR

Kami dengan senang hati menyampaikan hasil kajian ini yang berjudul "Analisis Dampak Keringanan PNBP bagi Operator Telekomunikasi di Indonesia." Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan implikasi dari penerapan keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap operator telekomunikasi di Indonesia.

Dalam konteks yang terus berkembang ini, operator telekomunikasi memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi yang andal dan inovatif. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memahami konsekuensi dari kebijakan keringanan PNBP yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

Kajian ini didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap data dan informasi terkini yang relevan dengan industri telekomunikasi di Indonesia. Melalui metode evaluasi yang komprehensif, kami menganalisis dampak keringanan PNBP terhadap operator telekomunikasi dari berbagai segi, seperti investasi, inovasi, layanan, keuangan, dan stimulus bagi perkembangan infrastruktur dan teknologi telekomunikasi.

Kami juga memberikan perhatian khusus terhadap pelanggan, dengan mempertimbangkan keberlanjutan layanan telekomunikasi yang berkualitas dan terjangkau. Selain itu, kami juga menganalisis mekanisme pengawasan yang ada serta memberikan rekomendasi dan strategi implementasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan keringanan PNBP.

Kami berharap bahwa kajian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan pemahaman yang mendalam tentang dampak keringanan PNBP bagi operator telekomunikasi di Indonesia. Semoga rekomendasi dan strategi implementasi yang kami sampaikan dapat menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovasi yang berkelanjutan di sektor telekomunikasi.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan stakeholder dalam membaca kajian ini. Kritik dan saran diterima dengan senang hati

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pemberian keringanan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap operator telekomunikasi di Indonesia. Keringanan PNBP adalah langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri telekomunikasi di negara ini.

Kajian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 yang mengatur tentang keringanan PNBP bagi operator telekomunikasi. Data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini meliputi laporan keuangan publik perusahaan telekomunikasi, data industri telekomunikasi, serta peraturan dan kebijakan terkait.

Dalam analisis ini, dilakukan evaluasi terhadap dampak keringanan PNBP terhadap kinerja keuangan operator telekomunikasi. Kajian ini juga menganalisis implikasi keringanan PNBP terhadap investasi, inovasi, dan pelayanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi kepada pelanggan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemberian keringanan PNBP memiliki dampak positif terhadap operator telekomunikasi. Dalam beberapa kasus, keringanan PNBP mendorong peningkatan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi, peningkatan inovasi teknologi, dan peningkatan kualitas layanan bagi pelanggan. Selain itu, keringanan PNBP juga memberikan stimulus bagi pertumbuhan industri telekomunikasi secara keseluruhan.

Namun demikian, kajian ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasi keringanan PNBP. Diantaranya adalah perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa keringanan PNBP tidak disalahgunakan, serta perlunya keseimbangan antara pemberian keringanan dengan keberlanjutan keuangan negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kajian	3
1.3 Ruang Lingkup Kajian	4
BAGIAN II OVERVIEW PERATURAN	6
2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020	6
2.1.1 Identifikasi Isu Liquiditas	7
2.1.2 Analisis Dampak Finansial dan Operasional	9
2.1.3 Pemilihan Bentuk Keringanan	11
2.1.4 Pengawasan dan Penegakan	12
2.2 Konteks dan Aplikasi Peraturan dalam Industri Telekomunikasi	14
2.3 Interpretasi Aturan terkait Keringanan PNBP	17
BAGIAN III: ANALISIS LIKUIDITAS OPERATOR TELEKOMUNIKASI	19
3.1 Teori, Konsep dan Metode Rasio Likuiditas	19
3.1.1 Teori, Konsep dan Metode Rasio Likuiditas	19
3.1.2 Pengertian dan Definisi Liquiditas	19
3.1.3 Tujuan Hasil Rasio Likuiditas Berdasarkan Buku	20
3.1.4 Kesulitan likuiditas berdasarkan literatur	21
3.1.5 Metode Pengukuran Likuiditas	22
3.2 Metode Analisis Liquiditas	23
3.2.1 Rasio Liquiditas	23
3.2.2 Arus Kas Operasional	25
3.2.3 Analisis Perencanaan Keuangan	25
3.2.4 Analisis Perputaran Piutang dan Persediaan	26
3.2.5 Analisis Kebijakan Pembayaran dan Pembiayaan	28
3.3 Hasil Analisis Likuiditas Operator Telekomunikasi	30
3.3.1 Hasil analisis untuk Operator Seluler	30
3.3.2 Hasil analisis untuk UMKM Seluler	40
BAGIAN IV: KAJIAN KERINGANAN PNBP	59
4.1 Proses Pengajuan Keringanan PNBP	59
4.2 Potensi Dampak Keringanan PNBP bagi Operator Telekomunikasi	61

BAGIAN V: REKOMENDASI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	64
5.1 Rekomendasi untuk Operator Telekomunikasi	64
5.2 Rekomendasi untuk Kominfo	65
5.3 Strategi Implementasi Rekomendasi	66
BAGIAN VI : PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan Kajian	67
6.2 Keterbatasan dan Peluang Kajian Selanjutnya	67

BAGIAN I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian nasional. Sebagai pilar penting dalam mendukung era digital dan globalisasi, industri ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri ini telah dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat.

Tantangan pertama dan yang paling mendalam adalah dampak dari pandemi COVID-19. Sebagai pandemi global yang mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi, COVID-19 telah memberikan tekanan yang besar pada sektor telekomunikasi. Pembatasan fisik dan perubahan drastis dalam perilaku konsumen telah mengubah pola penggunaan layanan telekomunikasi dan berpotensi mempengaruhi pendapatan operator.

Dalam kondisi pandemi, permintaan untuk layanan data dan komunikasi digital mengalami peningkatan tajam seiring dengan pergeseran aktivitas manusia ke ruang digital, baik untuk kegiatan belajar-mengajar, bekerja, berbelanja, hingga bersosialisasi. Meski permintaan layanan telekomunikasi meningkat, pandemi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek operasional dan finansial operator telekomunikasi. Dari segi operasional, pembatasan fisik dan protokol kesehatan mempengaruhi proses instalasi dan pemeliharaan infrastruktur. Sementara dari segi finansial, ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu arus kas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk pembayaran PNBP.

Tantangan kedua datang dari transformasi digital dan konvergensi teknologi. Teknologi terus berkembang dengan pesat, dan industri telekomunikasi diharuskan untuk selalu up-to-date dan mampu memenuhi tuntutan pasar yang dinamis. Investasi dalam peningkatan infrastruktur, termasuk pembangunan jaringan 5G dan optimalisasi layanan broadband, menjadi hal yang penting namun membutuhkan dana yang besar. Beban finansial ini dapat memberi tekanan tambahan terhadap likuiditas perusahaan.

Terakhir, persaingan yang semakin ketat dalam industri juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan semakin banyaknya pemain baru dalam industri ini, baik dari operator telekomunikasi

tradisional maupun perusahaan teknologi digital, perusahaan dituntut untuk selalu inovatif dan kompetitif, sementara harus tetap menjaga stabilitas keuangan dan profitabilitas.

Dalam konteks tantangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 memberikan ruang bagi operator telekomunikasi untuk mengajukan permohonan keringanan PNBP dalam situasi dan kondisi tertentu. Peraturan ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengatasi tantangan finansial dan menjaga stabilitas operasional mereka.

Namun, implementasi dan penyelesaian permohonan keringanan PNBP ini memerlukan pemahaman mendalam dan analisis yang cermat. Setiap operator perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi spesifik perusahaan sebelum mengajukan permohonan keringanan PNBP. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian menyeluruh mengenai kondisi likuiditas operator telekomunikasi di Indonesia dalam konteks pandemi COVID-19 dan tantangan lainnya. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan operator, dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang kapasitas dan kebutuhan setiap operator dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk pembayaran PNBP.

Kajian ini juga akan melihat bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 dapat diaplikasikan dalam konteks ini. Dengan memahami proses pengajuan dan penyelesaian permohonan keringanan PNBP, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang strategis dan berdasar untuk operator telekomunikasi dan Kominfo.

Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih luas mengenai dampak pandemi dan tantangan lain terhadap industri telekomunikasi Indonesia, dan bagaimana regulasi dan kebijakan dapat membantu industri ini untuk tetap bertahan dan berkembang. Melalui kajian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam membantu operator telekomunikasi dan Kominfo dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di tengah dinamika industri yang cepat ini.

Lebih lanjut, kajian ini juga mencoba untuk merangkum dan menganalisis berbagai faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi likuiditas perusahaan. Selain pandemi COVID-19 dan tantangan dalam industri, kondisi ekonomi makro seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan suku bunga juga akan ditinjau karena potensi dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Pemahaman mengenai variabel-variabel ini penting untuk membantu perusahaan merumuskan strategi keuangan yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam melakukan kajian ini, diterapkan pendekatan multidisiplin yang mencakup analisis keuangan, pengamatan industri, dan pengetahuan hukum peraturan perpajakan. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat menyajikan pandangan yang holistik dan mendalam tentang isu yang dihadapi oleh operator telekomunikasi dan bagaimana mereka dapat navigasi melalui tantangan ini.

Sebagai bagian dari kajian, juga akan melihat praktik dan pengalaman dari industri telekomunikasi di negara-negara lain yang telah menerapkan keringanan pajak atau PNBP dalam situasi krisis. Studi perbandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pembelajaran yang berharga untuk Indonesia dalam memanfaatkan mekanisme keringanan PNBP sebagai salah satu alat untuk mendukung keberlanjutan industri telekomunikasi.

Pada akhirnya, kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan referensi bagi Kominfo dan operator telekomunikasi dalam membuat keputusan strategis dan bijaksana terkait keringanan PNBP. Melalui kolaborasi dan solusi yang tepat, industri telekomunikasi Indonesia dapat melewati tantangan ini dan terus berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.2 Tujuan Kajian

Kajian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kondisi likuiditas operator telekomunikasi.

Dalam konteks ini, kajian dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang keadaan finansial dan likuiditas dari operator telekomunikasi di Indonesia. Melalui penelitian ini, kami berupaya untuk menganalisis dan merumuskan gambaran yang jelas dan objektif tentang posisi finansial operator, khususnya dalam hal kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk pembayaran PNBP.

- 2) Mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020

Kajian ini bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana peraturan ini dapat diterapkan oleh operator telekomunikasi dalam konteks keadaan saat ini. Kami berupaya untuk mengevaluasi proses pengajuan dan penyelesaian keringanan PNBP dan memberikan wawasan tentang bagaimana peraturan ini dapat memberikan manfaat bagi industri.

- 3) Memberikan rekomendasi strategis

Tujuan utama kajian ini adalah memberikan panduan yang dapat digunakan oleh operator telekomunikasi dan Kominfo dalam menghadapi tantangan yang ada. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi yang berdasarkan data dan analisis, dan yang paling penting, relevan dan berarti untuk situasi yang dihadapi oleh operator dan Kominfo saat ini.

4) Menyediakan analisis dan wawasan untuk mendukung pengambilan keputusan

Tujuan kajian ini juga mencakup penyediaan analisis yang mendalam dan berwawasan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan dalam laporan ini dirancang untuk membantu operator dan Kominfo dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien.

5) Mempromosikan diskusi dan kolaborasi antara operator dan Kominfo

Salah satu tujuan penting dari kajian ini adalah untuk merangsang diskusi produktif dan kolaborasi antara operator dan Kominfo. Kajian ini dapat membantu memfasilitasi dialog dan pemahaman bersama mengenai isu-isu kunci dan tantangan yang dihadapi oleh industri telekomunikasi.

1.3 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

1) Periode Analisis

Kajian ini akan mencakup analisis data dari tahun 2016 hingga 2020. Periode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang holistik tentang kinerja dan kondisi finansial operator telekomunikasi selama lima tahun terakhir, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020.

2) Operator Telekomunikasi

Kajian ini akan difokuskan pada lima operator telekomunikasi besar di Indonesia dan 48 operator UMKM. Pilihan ini mencerminkan pentingnya peran operator besar dalam industri dan pentingnya UMKM sebagai bagian dari ekosistem industri telekomunikasi di Indonesia.

3) Fokus Kajian

Kajian ini akan difokuskan pada kondisi likuiditas operator dan dampaknya terhadap pembayaran PNBP. Kajian ini menganalisis laporan keuangan operator, termasuk neraca,

laporan laba rugi, dan laporan arus kas, untuk memahami kemampuan operator dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk pembayaran PNBP.

4) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020.

Kajian ini memeriksa bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 dapat diaplikasikan oleh operator telekomunikasi dalam konteks pandemi COVID-19 dan tantangan lainnya. Kami ini juga mempelajari proses pengajuan dan penyelesaian permohonan keringanan PNBP dan memberikan wawasan tentang bagaimana peraturan ini dapat dimanfaatkan oleh operator telekomunikasi.

5) Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil analisis, kajian akan memberikan rekomendasi strategis untuk operator telekomunikasi dan Kominfo. Rekomendasi ini bertujuan untuk membantu operator dan Kominfo dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di industri telekomunikasi.

Meskipun kajian ini memberikan analisis yang seakurat mungkin, kajian ini terbatas pada data dan informasi yang tersedia pada saat penulisan. Oleh karena itu, interpretasi dan kesimpulan yang ditarik dari kajian ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan digunakan sebagai panduan, bukan sebagai prediksi pasti tentang masa depan.

BAGIAN II: OVERVIEW PERATURAN

2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam mengatur mekanisme keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Regulasi ini memfasilitasi serangkaian prosedur dan langkah-langkah yang penting dalam proses penyelesaian utang PNBP, melalui berbagai bentuk keringanan seperti penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan.

Ketika seorang Wajib Bayar menemukan dirinya dalam posisi di mana dia harus memohon keringanan PNBP, langkah pertama yang diambil adalah mengajukan permohonan. Melalui proses ini, proses penagihan dan pelimpahan atas PNBP yang terutang dapat ditunda. Ini menjadi contoh betapa pentingnya proses pengajuan permohonan sebagai gerbang awal dalam proses keringanan PNBP. Setelah permohonan diajukan, maka langkah berikutnya adalah pengecekan dokumen pendukung dan penelitian substansi permohonan keringanan. Ini dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen pendukung lengkap dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Mekanisme lain yang juga diatur dalam peraturan ini adalah permintaan dan/atau peminjaman dokumen oleh Instansi Pengelola PNBP untuk kepentingan penelitian. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi relevan ada dalam permohonan dan bahwa Wajib Bayar memenuhi kriteria untuk menerima keringanan.

Regulasi ini juga menjelaskan secara detail berbagai bentuk keringanan yang dapat diberikan, beserta prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Bayar. Ini termasuk konsekuensi jika Wajib Bayar gagal memenuhi kewajibannya. Untuk bentuk keringanan tertentu seperti pengurangan atau pembebasan, ada prosedur khusus yang memerlukan persetujuan Menteri. Ini mencerminkan pentingnya pertimbangan tingkat tinggi dalam proses ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 menjembatani kebutuhan Wajib Bayar akan keringanan PNBP dengan perlindungan kepentingan negara. Walaupun prosesnya tampak rumit, namun dengan pengajuan yang tepat dan tepat waktu, beban keuangan dapat diminimalisir dan denda atau sanksi lainnya dapat dihindari.

Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020, masalah likuiditas operator telekomunikasi menjadi faktor krusial yang dipertimbangkan oleh regulator, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam memberikan keringanan PNBPNBP.

2.1.1 Identifikasi Isu Likuiditas

Kominfo perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi keuangan operator telekomunikasi, khususnya terkait isu-isu likuiditas. Pertimbangan ini penting untuk mengetahui apakah operator benar-benar membutuhkan keringanan PNBPNBP atau tidak. Peraturan ini memungkinkan regulator untuk meminta dan memeriksa dokumen relevan dari operator sebagai bagian dari proses evaluasi. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020, masalah likuiditas operator telekomunikasi menjadi faktor krusial yang dipertimbangkan oleh regulator, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam memberikan keringanan PNBPNBP.

Masalah likuiditas merupakan isu yang sangat penting bagi operator telekomunikasi. Likuiditas yang cukup adalah kunci dalam menjalankan operasional bisnis yang lancar dan berkelanjutan. Gangguan likuiditas dapat timbul akibat beban keuangan yang tinggi, penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, atau kondisi eksternal yang mempengaruhi arus kas perusahaan. Dalam hal ini, operator telekomunikasi yang menghadapi masalah likuiditas perlu mempertimbangkan keringanan PNBPNBP sebagai salah satu solusi untuk mengatasi situasi keuangan yang sulit. Keringanan PNBPNBP dapat memberikan kelegaan dalam pembayaran PNBPNBP yang terutang, sehingga operator memiliki fleksibilitas keuangan lebih besar untuk memperbaiki arus kas mereka, melunasi kewajiban finansial, dan mempertahankan keberlanjutan bisnis. Namun, operator juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keringanan PNBPNBP terhadap keuangan mereka. Meskipun keringanan tersebut memberikan bantuan sementara, hal itu dapat mengakibatkan penundaan atau penurunan penerimaan PNBPNBP yang harus dibayarkan di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi operator untuk melakukan analisis yang cermat terhadap dampak keringanan PNBPNBP terhadap kesehatan keuangan jangka panjang mereka.

Regulator, dalam hal ini Kominfo, perlu mempertimbangkan masalah likuiditas operator telekomunikasi dengan hati-hati dalam memberikan keringanan PNBPNBP. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memberikan bantuan kepada operator yang membutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Namun, regulator juga harus memperhatikan target penerimaan PNBPNBP

yang telah ditetapkan. Keringanan PNBPN yang terlalu luas atau diberikan tanpa penilaian yang cermat dapat mengganggu pencapaian target penerimaan negara. Oleh karena itu, Kominfo perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi keuangan operator telekomunikasi untuk memastikan bahwa keringanan PNBPN diberikan kepada mereka yang memang membutuhkannya. Proses evaluasi yang dilakukan oleh regulator melalui penilaian dokumen relevan dari operator membantu dalam mengidentifikasi isu-isu likuiditas yang dihadapi oleh operator. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan operator, Kominfo dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan keringanan PNBPN yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masing-masing operator.

Selain itu, regulator juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keringanan PNBPN terhadap target penerimaan PNBPN secara keseluruhan. Meskipun memberikan keringanan PNBPN kepada operator yang mengalami likuiditas rendah dapat membantu dalam menjaga keberlanjutan operasional mereka, regulator perlu memastikan bahwa langkah ini tidak mengganggu pencapaian target penerimaan negara yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Kominfo dapat mengadopsi pendekatan yang seimbang antara memberikan keringanan PNBPN yang tepat kepada operator yang membutuhkannya dan menjaga keberlangsungan target penerimaan PNBPN. Regulator dapat mengambil langkah-langkah seperti melakukan evaluasi yang lebih detail terhadap kondisi keuangan operator, meminta laporan keuangan terbaru, dan melibatkan pihak terkait seperti lembaga keuangan atau auditor independen untuk memberikan pandangan objektif. Selain itu, Kominfo juga dapat mempertimbangkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah likuiditas operator. Misalnya, regulator dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas kredit yang lebih fleksibel bagi operator dalam mengatasi kebutuhan likuiditas mereka. Pendekatan ini dapat membantu menjaga target penerimaan PNBPN sambil tetap memberikan dukungan kepada operator dalam menghadapi tantangan likuiditas.

Dalam interpretasi aturan terkait keringanan PNBPN, Kominfo perlu mengambil pendekatan yang adil dan transparan. Hal ini akan menciptakan kepercayaan dari operator telekomunikasi dan memastikan bahwa keringanan PNBPN diberikan kepada mereka yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkannya. Regulator juga perlu memastikan bahwa proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait keringanan PNBPN dilakukan dengan tepat waktu, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya interpretasi yang jelas dan konsisten terkait aturan keringanan PNB, Kominfo dapat memberikan arahan yang jelas kepada operator telekomunikasi tentang prosedur dan persyaratan yang harus mereka penuhi untuk mengajukan keringanan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi operator dalam mengatasi masalah likuiditas mereka dan menjaga keberlangsungan bisnis telekomunikasi secara keseluruhan. Dalam rangka mengoptimalkan interpretasi aturan terkait keringanan PNB, Kominfo juga dapat melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti asosiasi industri, ahli keuangan, atau lembaga riset. Melalui diskusi dan konsultasi bersama, regulator dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang kondisi industri telekomunikasi dan faktor-faktor likuiditas yang dapat mempengaruhi operator. Ini akan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan efektif dalam memberikan keringanan PNB.

2.1.2 Analisis Dampak Finansial dan Operasional

Kominfo juga perlu mengevaluasi dampak potensial dari memberikan keringanan PNB terhadap kondisi finansial dan operasional operator. Misalnya, bagaimana keringanan ini akan membantu operator dalam menjaga likuiditas mereka dan memastikan operasional berjalan lancar.

Dalam mengaplikasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu melakukan analisis dampak finansial dan operasional terhadap operator telekomunikasi yang memperoleh keringanan PNB. Analisis ini penting untuk memahami konsekuensi dari memberikan keringanan tersebut dan sejauh mana hal itu akan membantu operator dalam menjaga likuiditas dan kelancaran operasional mereka. Berikut adalah penjelasan teknis terkait hal tersebut:

1) Dampak Finansial.

Analisis dampak finansial bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami implikasi keuangan yang timbul akibat memberikan keringanan PNB. Beberapa pertimbangan teknis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Arus Kas: Perlu diperiksa secara cermat bagaimana keringanan PNB akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Ini melibatkan memperkirakan perubahan dalam arus kas masuk dan keluar sebagai hasil dari penundaan, pengangsuran, pengurangan, atau pembebasan PNB. Analisis ini membantu dalam mengevaluasi likuiditas

- perusahaan dan memastikan bahwa keringanan PNBPN tidak akan mempengaruhi kemampuan operasional operator.
- b) Pengaruh terhadap Laba/Rugi: Dalam mempertimbangkan keringanan PNBPN, perlu dipahami bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan operator. Misalnya, jika PNBPN yang terutang dikurangi atau dibebaskan, hal ini akan berdampak pada pendapatan dan laba bersih operator. Analisis ini membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak finansial jangka pendek dan jangka panjang dari memberikan keringanan PNBPN.
 - c) Pengaruh terhadap Struktur Modal: Memberikan keringanan PNBPN dapat mempengaruhi struktur modal operator. Misalnya, jika pengurangan PNBPN diberikan, operator harus mempertimbangkan apakah hal itu akan berdampak pada pembiayaan perusahaan atau mengubah proporsi modal saham dan pinjaman. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa struktur modal operator tetap seimbang dan dapat mendukung keberlanjutan bisnis.

2) Dampak Operasional:

Analisis dampak operasional berkaitan dengan bagaimana memberikan keringanan PNBPN akan mempengaruhi operasional sehari-hari operator. Beberapa pertimbangan teknis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Kelangsungan Layanan: Dalam memberikan keringanan PNBPN, penting untuk memastikan bahwa operasional layanan operator tetap berjalan lancar. Perlu dipertimbangkan apakah memberikan keringanan PNBPN akan mempengaruhi kemampuan operator dalam mempertahankan tingkat pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b) Investasi dan Pengembangan: Keringanan PNBPN juga harus dievaluasi dalam konteks pengaruhnya terhadap rencana investasi dan pengembangan operator. Apakah keringanan ini akan mempengaruhi kemampuan operator untuk mengalokasikan sumber daya ke proyek-proyek baru atau pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan layanan telekomunikasi. Analisis ini membantu dalam memastikan

bahwa memberikan keringanan PNBPN tidak menghambat kemampuan operator untuk berinvestasi dan berkembang di masa depan.

- c) Efisiensi Operasional: Perlu dipertimbangkan apakah memberikan keringanan PNBPN akan berdampak pada efisiensi operasional operator. Misalnya, apakah ada perubahan dalam pengelolaan keuangan, proses pengawasan, atau alokasi sumber daya yang perlu diadaptasi sebagai hasil dari keringanan PNBPN. Analisis ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana operator dapat tetap efisien dan menjalankan operasional dengan baik meskipun menerima keringanan PNBPN.

2.1.3 Pemilihan Bentuk Keringanan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kominfo dapat memutuskan bentuk keringanan mana yang paling tepat untuk diberikan. Ini bisa berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, atau bahkan pembebasan PNBPN, tergantung pada situasi dan kebutuhan spesifik operator. Dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020, pemilihan bentuk keringanan PNBPN oleh Kominfo didasarkan pada hasil evaluasi dampak finansial dan operasional yang telah dilakukan terhadap operator telekomunikasi. Berikut adalah penjelasan teknis terkait pemilihan bentuk keringanan:

- 1) Penundaan: Penundaan PNBPN berarti operator diberikan waktu tambahan untuk melunasi kewajiban PNBPN mereka. Dalam pemilihan bentuk keringanan ini, Kominfo perlu mempertimbangkan apakah operator membutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki arus kas mereka dan apakah penundaan ini tidak akan mengganggu kelancaran operasional mereka. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa penundaan PNBPN tidak akan memberikan dampak negatif jangka panjang terhadap penerimaan PNBPN secara keseluruhan.
- 2) Pengangsuran: Pengangsuran PNBPN melibatkan pembayaran dalam jumlah yang terbagi-bagi dalam periode waktu tertentu. Dalam memilih pengangsuran sebagai bentuk keringanan, Kominfo harus memperhitungkan kemampuan operator untuk membayar PNBPN dalam jumlah tertentu setiap periode dan memastikan bahwa skema pengangsuran tersebut realistis dan tidak memberatkan operator secara finansial. Jangka waktu pengangsuran juga harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa operator dapat melunasi kewajiban PNBPN dengan lancar dan tetap menjaga likuiditas mereka.

- 3) Pengurangan: Pengurangan PNBП berarti jumlah yang harus dibayar oleh operator dikurangi sebagian atau sepenuhnya. Dalam memilih pengurangan sebagai bentuk keringanan, Kominfo harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap kondisi keuangan operator dan dampaknya terhadap target penerimaan PNBП. Pengurangan harus sebanding dengan kondisi keuangan operator dan tidak memberikan kerugian yang signifikan terhadap penerimaan PNBП secara keseluruhan.
- 4) Pembebasan: Pembebasan PNBП berarti operator dibebaskan dari kewajiban membayar PNBП yang terutang. Dalam memilih pembebasan sebagai bentuk keringanan, Kominfo perlu memastikan bahwa operator memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan dan bahwa pembebasan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional operator. Kominfo juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pembebasan PNBП terhadap target penerimaan PNBП dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dalam pemberian pembebasan ini.

Pemilihan bentuk keringanan PNBП harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi finansial operator, keberlanjutan target penerimaan PNBП, dan kebutuhan spesifik dari masing-masing operator. Dengan memilih bentuk keringanan yang tepat, Kominfo dapat memberikan dukungan yang efektif kepada operator telekomunikasi dalam mengatasi masalah likuiditas mereka dan menjaga kelancaran operasional bisnis mereka.

2.1.4 Pengawasan dan Penegakan

Setelah keringanan diberikan, regulator harus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa operator mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini juga mencakup penegakan hukum jika diperlukan. Dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020, pengawasan dan penegakan merupakan tahap penting setelah keringanan PNBП diberikan kepada operator telekomunikasi. Berikut penjelasan teknis terkait pengawasan dan penegakan:

- 1) Pengawasan. Setelah keringanan PNBП diberikan, regulator, dalam hal ini Kominfo, perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap operator untuk memastikan bahwa mereka mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan evaluasi

terhadap pelaksanaan keringanan PNBPN oleh operator, termasuk pemantauan pembayaran sesuai dengan skema yang telah ditentukan. Kominfo dapat melakukan verifikasi melalui laporan keuangan, pembukuan, atau dokumen lain yang relevan untuk memastikan bahwa operator mematuhi komitmen pembayaran PNBPN yang telah disepakati.

- 2) Penegakan. Jika terjadi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemberian keringanan PNBPN, regulator memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum yang sesuai. Langkah-langkah penegakan ini dapat mencakup sanksi administratif, denda, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kominfo dapat melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

Melalui pengawasan dan penegakan yang efektif, regulator dapat memastikan bahwa operator telekomunikasi tetap mematuhi kewajiban pembayaran PNBPN setelah diberikan keringanan. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan dan mencegah penyalahgunaan keringanan yang diberikan. Pengawasan dan penegakan yang ketat juga membantu memelihara integritas dan kepercayaan dalam industri telekomunikasi, serta memastikan keberlanjutan penerimaan PNBPN secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, Kominfo sebagai regulator harus memiliki sistem pengawasan dan mekanisme penegakan yang kuat untuk memastikan kepatuhan operator terhadap ketentuan setelah keringanan PNBPN diberikan. Upaya ini akan memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam memberikan keringanan PNBPN kepada operator telekomunikasi yang mengalami masalah likuiditas.

Dalam memberikan keringanan PNBPN, regulator perlu menimbang berbagai faktor, termasuk likuiditas operator. Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan adil, serta berdasarkan pertimbangan yang mendalam dan rinci. Selalu ada keseimbangan yang harus dicapai antara memberikan bantuan yang dibutuhkan operator dan menjaga kepentingan negara.

2.2 Konteks dan Aplikasi Peraturan dalam Industri Telekomunikasi

Dalam melakukan kajian ini, penting untuk memahami konteks dan aplikasi peraturan ini dalam industri telekomunikasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hal tersebut:

- 1) Konteks Industri Telekomunikasi

Industri telekomunikasi adalah sektor yang strategis dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan layanan komunikasi yang semakin meningkat telah mendorong pertumbuhan pesat dalam industri ini. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur berbagai aspek operasional dan keuangan dalam industri telekomunikasi sangatlah penting.

Industri telekomunikasi adalah sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Industri ini mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan layanan telekomunikasi, seperti telepon seluler, internet, jaringan komunikasi, dan layanan data. Pertumbuhan pesat dalam teknologi dan kebutuhan masyarakat akan konektivitas yang semakin meningkat telah mengubah lanskap industri telekomunikasi.

Penting untuk memahami konteks industri telekomunikasi karena peraturan yang mengatur PNBP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 berlaku khususnya dalam konteks industri ini. Regulasi ini dirancang untuk mengatasi isu-isu likuiditas yang mungkin dihadapi oleh operator telekomunikasi, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban PNBP.

2) Aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020

Peraturan ini secara khusus mengatur mekanisme keringanan PNBP dalam industri telekomunikasi. PNBP yang terutang oleh operator telekomunikasi dapat diberikan keringanan berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, atau pembebasan. Aplikasi peraturan ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memberikan stimulus dan dukungan kepada operator dalam menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 memiliki aplikasi yang spesifik dalam industri telekomunikasi. Regulasi ini mengatur mekanisme keringanan PNBP, seperti penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan PNBP yang terutang oleh operator telekomunikasi. Aplikasi peraturan ini mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus industri telekomunikasi, dengan tujuan untuk membantu operator dalam menghadapi tantangan likuiditas yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional mereka.

Dalam kajian ini, penting untuk memahami secara rinci bagaimana peraturan ini diaplikasikan dalam industri telekomunikasi. Ini meliputi pemahaman terhadap syarat dan ketentuan yang

harus dipenuhi oleh operator telekomunikasi untuk mendapatkan keringanan PNBP, prosedur pengajuan permohonan, evaluasi kelayakan, serta pengawasan dan penegakan yang terkait.

3) Perlindungan Kepentingan Operator

Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan operator telekomunikasi. Dalam situasi-situasi tertentu, seperti kondisi likuiditas yang sulit atau kebijakan pemerintah yang berdampak negatif terhadap operator, peraturan ini memungkinkan operator untuk mengajukan permohonan keringanan PNBP. Hal ini bertujuan untuk membantu operator mengatasi tantangan finansial dan memastikan kelangsungan operasional mereka.

Beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan:

- a) Kerangka Hukum yang Jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi operator telekomunikasi dalam melindungi kepentingan mereka. Regulasi ini memberikan landasan yang kuat untuk mengatur keringanan PNBP dalam industri telekomunikasi. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, operator telekomunikasi memiliki pedoman yang pasti dalam mengajukan permohonan keringanan PNBP dan menjaga keberlanjutan operasional mereka.
- b) Perlindungan dalam Situasi Likuiditas Sulit. Peraturan ini memberikan perlindungan bagi operator telekomunikasi dalam situasi-situasi tertentu yang menghadapi kondisi likuiditas yang sulit. Dalam keadaan seperti ini, operator dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP untuk mengatasi tantangan finansial yang mereka hadapi. Regulasi ini memungkinkan operator untuk menunda pembayaran, mengangsur, mengurangi, atau bahkan membebaskan PNBP yang terutang, sesuai dengan kebutuhan dan situasi spesifik operator.
- c) Dampak Kebijakan Pemerintah yang Negatif. Peraturan ini juga memberikan perlindungan bagi operator telekomunikasi dalam menghadapi dampak negatif dari kebijakan pemerintah. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah tertentu dapat mempengaruhi operasional dan keuangan operator telekomunikasi secara negatif. Dalam situasi seperti ini, peraturan ini memungkinkan operator untuk mengajukan permohonan keringanan PNBP sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, dengan tujuan untuk membantu

operator dalam mengatasi dampak finansial yang merugikan dan memastikan kelangsungan operasional mereka.

Dengan adanya perlindungan kepentingan operator telekomunikasi yang diberikan oleh peraturan ini, operator dapat memiliki jaminan bahwa kondisi likuiditas yang sulit atau kebijakan pemerintah yang merugikan tidak akan menghambat kelangsungan operasional mereka secara signifikan. Perlindungan ini memastikan bahwa operator tetap dapat beroperasi dan memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat dengan baik.

4) Dukungan Terhadap Pertumbuhan Industri

Melalui mekanisme keringanan PNBPN yang diatur dalam peraturan ini, pemerintah memberikan dukungan yang lebih luas bagi pertumbuhan industri telekomunikasi. Keringanan ini dapat membantu operator dalam menginvestasikan dana yang seharusnya dialokasikan untuk PNBPN ke dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, peraturan ini berperan dalam mendorong inovasi dan kemajuan industri telekomunikasi secara keseluruhan.

- a) Investasi dalam Pengembangan Infrastruktur. Ketika operator telekomunikasi dapat memperoleh keringanan PNBPN, mereka dapat mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar PNBPN ke dalam pengembangan infrastruktur. Hal ini memungkinkan operator untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan telekomunikasi yang mereka tawarkan. Dukungan pemerintah melalui keringanan PNBPN memperkuat kemampuan operator untuk melakukan investasi yang diperlukan dalam memperluas jaringan dan meningkatkan konektivitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing industri telekomunikasi secara keseluruhan.
- b) Peningkatan Kualitas Layanan. Dengan mendapatkan keringanan PNBPN, operator telekomunikasi dapat mengarahkan sumber daya ke peningkatan kualitas layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk PNBPN dapat digunakan untuk melakukan investasi dalam teknologi terkini, meningkatkan kecepatan dan keandalan jaringan, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri telekomunikasi, karena kualitas layanan yang lebih baik dapat menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang ada, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan.

- c) Inovasi dan Kemajuan Industri. Dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui keringanan PNBPN, operator telekomunikasi didorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Dana yang sebelumnya diperuntukkan untuk PNBPN dapat digunakan untuk mengembangkan solusi teknologi baru, meluncurkan produk dan layanan yang inovatif, serta meningkatkan efisiensi operasional. Ini memberikan dorongan bagi industri telekomunikasi untuk tetap kompetitif dan relevan dalam era digital yang terus berkembang.

Dalam kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020, pemahaman tentang konteks dan aplikasi peraturan dalam industri telekomunikasi sangat penting. Dengan adanya regulasi yang memadai dan berimbang, diharapkan operator telekomunikasi dapat tetap beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan negara.

2.3 Interpretasi Aturan terkait Keringanan PNBPN

Dalam melakukan kajian, penting untuk memahami interpretasi aturan terkait keringanan PNBPN yang diatur dalam peraturan tersebut. Berikut ini adalah penjelasan mengenai interpretasi aturan terkait keringanan PNBPN:

- 1) Penundaan PNBPN Terutang

Aturan ini memberikan kemungkinan bagi operator telekomunikasi untuk menunda pembayaran PNBPN yang terutang dalam situasi tertentu. Penundaan ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran finansial kepada operator agar dapat memperbaiki likuiditas dan mengatasi kendala keuangan yang sedang dihadapi.

- 2) Pengangsuran PNBPN Terutang

Selain penundaan, peraturan ini juga mengatur mekanisme pengangsuran PNBPN yang terutang. Operator telekomunikasi dapat mengajukan permohonan pengangsuran untuk membayar PNBPN dengan jangka waktu tertentu. Hal ini memungkinkan operator untuk melunasi PNBPN secara bertahap dan mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung dalam satu waktu.

- 3) Pengurangan PNBPN Terutang

Jika operator telekomunikasi menghadapi kesulitan finansial yang signifikan, peraturan ini juga memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan pengurangan PNBPN yang terutang.

Pengurangan PNBPN ini dapat membantu mengurangi jumlah yang harus dibayarkan oleh operator dan memberikan keringanan yang lebih besar dalam situasi yang sulit.

4) Pembebasan PNBPN Terutang

Dalam beberapa kasus tertentu, operator telekomunikasi dapat memperoleh pembebasan PNBPN yang terutang sepenuhnya. Hal ini biasanya diberikan dalam kondisi-kondisi yang ekstrem, seperti bencana alam atau kondisi kahar yang diakui oleh instansi pengelola PNBPN. Pembebasan ini bertujuan untuk memberikan keringanan yang signifikan bagi operator dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.

5) Prosedur dan Syarat Permohonan Keringanan

Peraturan ini juga mengatur prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh operator telekomunikasi dalam mengajukan permohonan keringanan PNBPN. Operator harus melengkapi dokumen pendukung yang relevan dan mematuhi batas waktu yang ditentukan. Hal ini penting agar permohonan keringanan dapat diproses dengan baik dan transparan.

Dalam kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020, interpretasi aturan terkait keringanan PNBPN menjadi penting untuk memahami implementasi peraturan tersebut dalam konteks industri telekomunikasi. Interpretasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam akan memastikan operator telekomunikasi dapat memanfaatkan keringanan PNBPN dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAGIAN III: ANALISIS LIKUIDITAS OPERATOR TELEKOMUNIKASI

3.1 Teori, Konsep dan Metode Rasio Likuiditas

3.1.1 Teori, Konsep dan Pengertian Likuiditas

Teori-teori dan konsep terkait likuiditas dapat melibatkan beberapa aspek yang penting. Berikut ini adalah beberapa teori dan konsep yang relevan serta metode pengukurannya:

- 1) Teori Likuiditas:
 - a) Teori Arus Kas: Teori ini mengatakan bahwa likuiditas merupakan kemampuan sebuah entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dengan menggunakan arus kas yang tersedia.
 - b) Teori Persediaan Aktiva Lancar: Teori ini menyatakan bahwa likuiditas dapat diukur berdasarkan jumlah dan kualitas dari aktiva lancar yang dimiliki oleh entitas.
 - c) Teori Opsi Reversibilitas: Teori ini mengasumsikan bahwa likuiditas terkait dengan kemampuan entitas untuk memperoleh kembali dana dalam jangka waktu yang relatif singkat tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan.
- 2) Konsep Likuiditas:
 - a) Kemampuan Membayar Utang: Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu entitas untuk membayar utang atau kewajiban finansialnya tepat waktu.
 - b) Konversi Aktiva Lancar: Likuiditas juga terkait dengan kemampuan entitas untuk mengkonversi aktiva lancar menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang singkat.
 - c) Perdagangan Aktiva: Kemampuan entitas untuk membeli atau menjual aktiva dengan cepat dan dengan biaya transaksi yang rendah juga merupakan aspek penting dalam likuiditas.

3.1.2 Pengertian dan definisi likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu entitas, baik perusahaan maupun individu, untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang mudah diubah menjadi uang tunai. Likuiditas mencerminkan sejauh mana entitas dapat membayar utang-utangnya atau memenuhi kebutuhan kasnya tanpa mengganggu kelancaran operasional.

Likuiditas adalah ukuran kecepatan dan kemudahan dengan mana aset dapat dijual atau dikonversi menjadi uang tunai tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Likuiditas sering dihubungkan dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan memfasilitasi aktivitas perdagangan yang efisien. Likuiditas adalah kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka waktu yang singkat, biasanya dalam satu tahun. Likuiditas dilihat dari sisi kecukupan kas dan aset lancar lainnya untuk membayar utang yang jatuh tempo. Likuiditas adalah kemampuan bank atau pasar keuangan dalam memperlancar proses pembiayaan dan transaksi dengan menyediakan likuiditas yang cukup dalam bentuk uang tunai atau aset yang mudah dijual.

3.1.3 Tujuan hasil rasio likuiditas berdasarkan buku

Tujuan dari analisis rasio likuiditas adalah untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Dengan menggunakan rasio likuiditas, kita dapat mengukur tingkat likuiditas perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari hasil rasio likuiditas:

1) Mengukur Kemampuan Bayar

Rasio likuiditas memberikan gambaran tentang seberapa cepat perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya. Ini membantu dalam mengevaluasi apakah perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu.

2) Mengidentifikasi Potensi Masalah Likuiditas

Rasio likuiditas dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah likuiditas yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Jika rasio likuiditas menunjukkan penurunan yang signifikan dari periode sebelumnya atau berada di bawah standar industri, hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam mengelola kas dan aset lancar.

3) Evaluasi Efisiensi Pengelolaan Aset Lancar

Rasio likuiditas juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan aset lancar perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola aset lancarnya dengan baik akan memiliki rasio likuiditas yang lebih tinggi, menunjukkan penggunaan yang efektif dari aset-aset tersebut.

4) Perencanaan Keuangan

Hasil rasio likuiditas dapat digunakan dalam perencanaan keuangan perusahaan. Dengan mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, manajemen dapat mengidentifikasi kebutuhan kas yang potensial, mengembangkan strategi pengelolaan likuiditas yang tepat, dan membuat keputusan finansial yang lebih baik.

5) Membandingkan dengan Standar Industri

Rasio likuiditas juga memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan standar industri atau pesaing sejenis. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang posisi likuiditas perusahaan dalam konteks industri yang lebih luas.

3.1.4 Kesulitan likuiditas berdasarkan literatur

Kesulitan likuiditas merujuk pada situasi di mana suatu entitas atau individu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Hal ini terjadi ketika sumber daya finansial yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar. Teori dan literatur terkait kesulitan likuiditas memberikan beberapa pemahaman yang berguna tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah likuiditas. Berikut adalah penjelasan teoritis yang umum terkait dengan kesulitan likuiditas:

- 1) Cicilan Utang yang Tidak Terpenuhi: Salah satu penyebab umum kesulitan likuiditas adalah ketidakmampuan untuk membayar cicilan utang yang jatuh tempo. Ini dapat terjadi karena kekurangan kas yang signifikan, aliran kas yang buruk, atau penggunaan sumber daya finansial yang tidak efisien.
- 2) Penurunan Pendapatan: Jika pendapatan perusahaan menurun secara signifikan, hal ini dapat menyebabkan kesulitan likuiditas. Penurunan pendapatan dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan pasar, permintaan yang menurun, atau perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan.
- 3) Pertumbuhan yang Cepat: Pertumbuhan yang cepat dapat menyebabkan tekanan likuiditas pada perusahaan. Meskipun pertumbuhan yang cepat mungkin diinginkan, namun jika tidak diimbangi dengan arus kas yang memadai, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya.
- 4) Kebutuhan Investasi Besar: Jika perusahaan memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, atau ekspansi bisnis, hal ini dapat menguras kas yang ada dan menyebabkan

kesulitan likuiditas. Biaya investasi yang tinggi dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

- 5) Ketergantungan pada Pembiayaan Eksternal: Jika perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal, seperti pinjaman bank atau penerbitan obligasi, untuk memenuhi kewajiban finansialnya, adanya perubahan kondisi pasar atau ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan dapat menyebabkan kesulitan likuiditas.
- 6) Perubahan Regulasi atau Kebijakan: Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang berdampak negatif terhadap perusahaan atau industri tertentu dapat menyebabkan kesulitan likuiditas. Perubahan ini dapat mengubah struktur biaya, menurunkan pendapatan, atau meningkatkan kewajiban finansial, yang semuanya dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan.
- 7) Kesalahan Manajemen Keuangan: Kesalahan dalam manajemen keuangan seperti pengelolaan kas yang tidak efisien, pengeluaran yang tidak terkendali, atau kurangnya perencanaan keuangan yang baik dapat menyebabkan kesulitan likuiditas.

3.1.5 Metode Pengukuran Likuiditas

Metode Pengukuran Likuiditas:

- 1) Rasio Lancar

Salah satu metode yang umum digunakan adalah rasio lancar, yang mengukur kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar.

- 2) Rasio Cepat

Rasio ini mengukur likuiditas dengan mempertimbangkan aktiva lancar yang paling likuid, seperti kas, surat berharga, dan piutang dagang.

- 3) Periode Koleksi Piutang

Metode ini melibatkan pengukuran waktu yang dibutuhkan oleh entitas untuk mengumpulkan piutang dagang dari pelanggan.

- 4) Periode Penjualan Persediaan

Metode ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan entitas dan mengubahnya menjadi kas.

3.2 Metodologi Analisis Likuiditas

Dalam melakukan analisis likuiditas operator telekomunikasi, diperlukan metodologi yang tepat untuk memahami dan mengevaluasi kondisi keuangan mereka. Berikut ini adalah beberapa metode yang dapat digunakan dalam analisis likuiditas operator telekomunikasi.

3.2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah metode yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan operator telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Beberapa rasio likuiditas yang relevan termasuk rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), dan rasio kas (cash ratio). Rasio-rasio ini menggambarkan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar dan memberikan gambaran tentang kemampuan operator dalam membayar kewajiban finansialnya dalam jangka pendek.

Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid. Beberapa rasio likuiditas yang relevan dalam analisis keuangan termasuk:

- 1) Rasio Lancar (Current Ratio): Rasio Lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rasio ini dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Aset lancar termasuk kas, piutang usaha, persediaan, dan aset lain yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu satu tahun. Kewajiban lancar mencakup hutang usaha, hutang jangka pendek, dan kewajiban lain yang jatuh tempo dalam satu tahun. Rasio lancar memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio lancar, semakin likuid perusahaan.
- 2) Rasio Cepat (Quick Ratio): Rasio Cepat, juga dikenal sebagai rasio acid test ratio, adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dikurangi persediaan dengan total kewajiban lancar. Rasio cepat menghilangkan persediaan dari aset lancar karena persediaan seringkali tidak dapat segera diubah menjadi kas. Dengan mengabaikan persediaan, rasio cepat memberikan gambaran yang lebih konservatif tentang likuiditas perusahaan.

- 3) Rasio Kas (Cash Ratio): Rasio Kas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan total kewajiban lancar. Kas dan setara kas termasuk uang tunai di tangan, saldo rekening bank yang dapat segera ditarik, serta investasi jangka pendek yang sangat likuid. Rasio kas memberikan gambaran yang sangat konservatif tentang likuiditas perusahaan, karena hanya mempertimbangkan aset yang paling likuid.

Ketiga rasio ini memberikan informasi yang berbeda tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar memberikan gambaran umum tentang likuiditas, sementara rasio cepat dan rasio kas memberikan gambaran yang lebih konservatif dengan menghilangkan persediaan atau aset tidak likuid lainnya. Penting untuk membandingkan rasio-rasio ini dengan standar industri atau dengan perusahaan sejenis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi likuiditas perusahaan.

Rumus setiap rasio:

1. Rasio Lancar (Current Ratio):

Rumus: $Current\ Ratio = Aset\ Lancar / Kewajiban\ Lancar$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio lancar, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebagai pedoman umum, rasio lancar yang sehat adalah sekitar 1,5 atau lebih.

2. Rasio Cepat (Quick Ratio):

Rumus: $Quick\ Ratio = (Aset\ Lancar - Persediaan) / Kewajiban\ Lancar$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang paling likuid, setelah menghapus persediaan dari aset lancar. Persediaan seringkali tidak dapat segera diubah menjadi kas, oleh karena itu rasio cepat memberikan gambaran yang lebih konservatif tentang likuiditas perusahaan.

3. Rasio Kas (Cash Ratio):

Rumus: $Cash\ Ratio = Kas\ dan\ Setara\ Kas / Kewajiban\ Lancar$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas yang merupakan aset paling likuid. Rasio kas memberikan gambaran yang sangat konservatif tentang likuiditas perusahaan, karena hanya mempertimbangkan aset yang paling likuid.

3.2.2 Arus Kas Operasional

Analisis arus kas operasional menjadi penting dalam memahami likuiditas operator telekomunikasi. Arus kas operasional mencerminkan aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasional perusahaan. Jika arus kas operasional positif, itu menunjukkan bahwa operator mampu menghasilkan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Namun, jika arus kas operasional negatif, itu dapat menunjukkan masalah likuiditas.

3.2.3 Analisis Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan yang baik menjadi faktor kunci dalam mengelola likuiditas operator telekomunikasi. Analisis perencanaan keuangan melibatkan pemantauan dan pengendalian terhadap aliran kas masuk dan keluar, proyeksi pendapatan dan biaya, serta pengaturan pembiayaan yang tepat. Dengan memiliki perencanaan keuangan yang matang, operator dapat mengantisipasi tantangan likuiditas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional.

Analisis arus kas operasional adalah komponen penting dalam memahami likuiditas operator telekomunikasi. Arus kas operasional menggambarkan aliran masuk dan keluar kas yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa, pembayaran kepada pemasok, dan biaya operasional lainnya. Arus kas operasional dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasi inti bisnisnya.

Rumus yang umum digunakan untuk menghitung arus kas operasional adalah dengan menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung.

1) Metode Langsung:

Metode ini melibatkan penguraian langsung dari semua aliran kas yang terkait dengan aktivitas operasional, termasuk penerimaan kas dari penjualan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas untuk biaya operasional, dan lain sebagainya. Selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar akan memberikan jumlah arus kas operasional bersih.

Rumus metode langsung:

Arus Kas Operasional = Penerimaan Kas dari Pelanggan - Pembayaran Kas kepada Pemasok - Pembayaran Kas untuk Biaya Operasional Lainnya

2) Metode Tidak Langsung:

Metode ini melibatkan penyesuaian laba bersih perusahaan dengan perubahan dalam aset dan kewajiban yang tidak mempengaruhi arus kas langsung. Metode ini mengambil laba bersih sebagai titik awal dan kemudian melakukan penyesuaian untuk menghitung arus kas operasional bersih.

Rumus metode tidak langsung:

Arus Kas Operasional = Laba Bersih + Penambahan Non-Kas dalam Laporan Laba Rugi - Pengurangan Non-Kas dalam Laporan Laba Rugi

Dalam kedua metode tersebut, hasil akhir adalah jumlah arus kas operasional bersih. Jika arus kas operasional positif, itu menunjukkan bahwa operator mampu menghasilkan kas yang cukup dari aktivitas operasional untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Namun, jika arus kas operasional negatif, hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah likuiditas, yang mungkin memerlukan perhatian dan tindakan untuk memperbaiki situasi keuangan perusahaan.

3.2.4 Analisis Perputaran Piutang dan Persediaan

Perputaran piutang dan persediaan adalah metode yang berguna untuk mengukur efisiensi operator dalam mengelola aset lancar mereka. Piutang dan persediaan yang tidak tertagih atau tersimpan dalam jumlah besar dapat menyebabkan kesulitan likuiditas. Dengan menganalisis perputaran piutang dan persediaan, operator dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan likuiditas.

Analisis perencanaan keuangan merupakan faktor kunci dalam mengelola likuiditas operator telekomunikasi. Perencanaan keuangan yang baik melibatkan pemantauan dan pengendalian terhadap aliran kas masuk dan keluar, proyeksi pendapatan dan biaya, serta pengaturan pembiayaan yang tepat. Dengan memiliki perencanaan keuangan yang matang, operator dapat mengantisipasi tantangan likuiditas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional.

Rumus yang dapat digunakan dalam pengukuran perencanaan keuangan:

1) Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan mengacu pada estimasi pendapatan yang diharapkan akan diterima oleh operator telekomunikasi dalam periode tertentu. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung proyeksi pendapatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Proyeksi Pendapatan} = \text{Jumlah Pelanggan} \times \text{Pendapatan Rata-rata per Pelanggan}$$

2) Proyeksi Biaya

Proyeksi biaya melibatkan estimasi biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis operator telekomunikasi. Biaya tersebut dapat meliputi biaya infrastruktur, biaya operasional, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung proyeksi biaya adalah sebagai berikut:

$$\text{Proyeksi Biaya} = \text{Biaya Infrastruktur} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemasaran} + \text{dll}$$

3) Arus Kas Proyeksi

Arus kas proyeksi adalah proyeksi aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. Ini mencerminkan perkiraan jumlah kas yang akan tersedia atau dikeluarkan dalam periode tertentu.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung arus kas proyeksi adalah sebagai berikut:

$$\text{Arus Kas Proyeksi} = \text{Pendapatan Proyeksi} - \text{Biaya Proyeksi}$$

4) Pengaturan Pembiayaan:

Pengaturan pembiayaan mencakup pengelolaan sumber daya keuangan dan pemilihan instrumen keuangan yang sesuai untuk mendukung operasi bisnis operator telekomunikasi. Ini

dapat meliputi penggunaan modal sendiri, pinjaman, pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang, dan lain sebagainya. Rumus yang dapat digunakan terkait pengaturan pembiayaan adalah:

$$\text{Pembiayaan} = \text{Modal Sendiri} + \text{Pinjaman} + \text{Pembiayaan Lainnya}$$

Dengan menggunakan rumus-rumus ini dan melakukan analisis terhadap proyeksi pendapatan, biaya, arus kas, dan pengaturan pembiayaan, operator telekomunikasi dapat mengembangkan perencanaan keuangan yang matang. Hal ini akan membantu mereka dalam mengelola likuiditas dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan.

3.2.5 Analisis Kebijakan Pembayaran dan Pembiayaan

Kebijakan pembayaran yang fleksibel dan pembiayaan yang tepat dapat membantu mengelola likuiditas operator telekomunikasi. Melalui analisis kebijakan pembayaran, operator dapat menentukan kebijakan penagihan yang efektif, seperti diskon pembayaran dini atau skema cicilan yang menguntungkan. Selain itu, pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga penting untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam jangka pendek.

Analisis kebijakan pembayaran dan pembiayaan menjadi penting dalam mengelola likuiditas operator telekomunikasi. Kebijakan pembayaran yang fleksibel dan pemilihan pembiayaan yang tepat dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan likuiditas. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam analisis kebijakan pembayaran dan pembiayaan:

1) Kebijakan Pembayaran

Diskon Pembayaran Dini: Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Diskon Pembayaran Dini = Persentase Diskon x Jumlah Tagihan

Skema Cicilan: Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Jumlah Cicilan = Jumlah Tagihan / Jumlah Cicilan yang Ditetapkan

2) Pembiayaan

Rasio Utang terhadap Modal Sendiri: Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Rasio Utang terhadap Modal Sendiri = Total Utang / Modal Sendiri

Rasio Utang terhadap Aktiva: Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Rasio Utang terhadap Aktiva = Total Utang / Total Aktiva

Rasio Pembayaran Bunga: Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Rasio Pembayaran Bunga = Jumlah Pembayaran Bunga / Jumlah Utang yang Berbunga

Dalam analisis kebijakan pembayaran, operator perlu mempertimbangkan diskon pembayaran dini atau skema cicilan yang dapat mendorong pelanggan untuk membayar tagihan tepat waktu. Selain itu, dalam pembiayaan, operator perlu memperhatikan rasio utang terhadap modal sendiri dan aktiva untuk memastikan keseimbangan yang sehat antara sumber pembiayaan internal dan eksternal. Juga, rasio pembayaran bunga perlu diperhatikan untuk memastikan kemampuan operator dalam membayar bunga yang terkait dengan utang yang dimiliki.

Dengan melakukan analisis kebijakan pembayaran yang efektif dan pemilihan pembiayaan yang tepat, operator telekomunikasi dapat mengelola likuiditas dengan lebih baik, menjaga aliran kas yang stabil, dan memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam jangka pendek.

Melalui penerapan metodologi analisis likuiditas yang tepat, operator telekomunikasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan mereka dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas. Selain metode-metode di atas, ada beberapa pendekatan lain yang dapat digunakan dalam analisis likuiditas operator telekomunikasi, seperti analisis rasio keuangan secara menyeluruh, analisis pendapatan dan biaya, serta analisis risiko likuiditas. Metode-metode ini dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang keadaan keuangan operator telekomunikasi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait manajemen likuiditas.

Analisis likuiditas harus dilakukan secara terus-menerus dan secara berkala untuk memantau perubahan dalam kondisi keuangan operator telekomunikasi. Hal ini akan memungkinkan identifikasi dini terhadap masalah likuiditas dan pengambilan tindakan yang cepat untuk mengatasinya. Selain itu, analisis likuiditas juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi likuiditas, seperti perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kondisi pasar,

dan faktor risiko lainnya. Metodologi analisis likuiditas merupakan alat yang penting dalam menggambarkan kondisi keuangan operator telekomunikasi. Dengan memahami dan menerapkan metode-metode tersebut, operator dapat mengelola likuiditas mereka dengan lebih baik, mengatasi kesulitan likuiditas, dan memastikan kelangsungan operasional yang optimal.

3.3 Hasil Analisis Likuiditas Operator Telekomunikasi

3.3.1 Hasil analisis untuk Operator Seluler

Dalam kajian ini, dilakukan analisis likuiditas untuk tiga operator seluler berdasarkan rasio likuiditas yang relevan, yaitu Current Ratio. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan likuiditas perusahaan dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, penting untuk dicatat bahwa data yang dapat diolah hanya tersedia untuk tiga operator, yaitu Indosat, Smartfren, dan Telkomsel. Operator lainnya, yaitu Smart Telecom dan XL Axiata, tidak dapat diolah karena keterbatasan data. Total data 5 Operator. 3 dari 5 operator dapat diolah, sedangkan 2 operator tidak dapat diolah karena:

No	Nama PT.	Keterangan
1	Smart Telecom	Hanya terdiri dari LK tahun 2019 dan 2021
2	XL Axiata	Tidak terdapat LK tahun 2019

Berdasarkan dari data yang dapat diolah, berikut hasil hitungan berdasarkan Rasio Likuiditas:

1. Current Ratio

Rasio Lancar atau Current Ratio adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan (necara) likuiditas perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode pelaporan. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar (Current Assets)}}{\text{Kewajiban Lancar (Current Liabilities)}}$$

Standar Industri	1 Kali
------------------	--------

Hasil dari LK Opsel:

NO	NAMA PERUSAHAAN	CURRENT RATIO (2)				KESIMPULAN	
		2018	2019	2020	2021		
1	INDOSAT	0,38	0,56	0,42	0,40	0	TIDAK SEHAT
2	SMARTFREN	0,33	0,29	0,31	0,24	0	TIDAK SEHAT
3	TELKOMSEL	0,81	0,89	0,67	0,39	0	TIDAK SEHAT

Berikut Skala Tidak Sehat:

NO	NAMA PERUSAHAAN	CURRENT RATIO (1)							
		Ket.	2018	Ket.	2019	Ket.	2020	Ket.	2021
1	INDOSAT	B	0,38	S	0,56	S	0,42	B	0,40
2	SMARTFREN	B	0,33	B	0,29	B	0,31	B	0,24
3	TELKOMSEL	SR	0,81	SR	0,89	R	0,67	B	0,39

Keterangan:

SR	Sangat Ringan	0,81 – 0,99
R	Ringan	0,61 – 0,80
S	Sedang	0,41 – 0,60
B	Berat	0,21 – 0,40
SB	Sangat Berat	0,0 – 0,20

Berdasarkan hasil perhitungan Current Ratio, ditemukan bahwa semua operator seluler yang dapat diolah mengalami likuiditas yang tidak sehat sepanjang periode yang dianalisis (2018-2021). Current Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Standar industri untuk Current Ratio adalah 1 kali, yang berarti aset lancar perusahaan harus setidaknya sebanding dengan kewajiban lancar yang dimiliki.

Indosat memiliki Current Ratio di bawah standar sepanjang periode analisis, menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang dimiliki. Smartfren juga mengalami masalah likuiditas yang serupa dengan Current Ratio yang rendah sepanjang periode waktu yang sama. Telkomsel, meskipun memiliki Current Ratio yang lebih tinggi daripada Indosat dan Smartfren, masih tidak mencapai standar industri yang dianjurkan.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ketiga operator seluler yang dapat diolah, yaitu Indosat, Smartfren, dan Telkomsel, menghadapi masalah likuiditas yang tidak sehat sepanjang periode

analisis. Current Ratio yang rendah menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya.

Indosat dan Smartfren, dengan Current Ratio yang terus menurun dari tahun ke tahun, perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan likuiditas mereka. Mereka dapat mengkaji kebijakan pembayaran yang lebih efektif, seperti memberikan diskon pembayaran dini kepada pelanggan atau mengatur skema cicilan yang menguntungkan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan pembiayaan yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek.

Telkomsel, meskipun memiliki Current Ratio yang lebih tinggi daripada dua operator lainnya, masih perlu memperhatikan likuiditasnya yang terus menurun. Perusahaan dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan pembayaran dan pembiayaan yang digunakan untuk memastikan ketersediaan Likuiditas yang cukup dalam jangka pendek dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Dalam menghadapi kesulitan likuiditas, operator-operator seluler perlu melakukan perencanaan keuangan yang matang. Perencanaan keuangan yang baik akan membantu operator dalam mengelola aliran kas masuk dan keluar, serta membuat proyeksi pendapatan dan biaya yang akurat. Dengan perencanaan keuangan yang matang, operator dapat mengantisipasi tantangan likuiditas dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kelangsungan operasional mereka.

Selain itu, penting bagi operator seluler untuk memiliki kebijakan pembayaran yang fleksibel. Diskon pembayaran dini atau skema cicilan yang menguntungkan dapat membantu meningkatkan aliran kas masuk dan mengurangi beban likuiditas dalam jangka pendek. Dalam hal pembiayaan, pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan menjadi penting. Hal ini akan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung operasional perusahaan dalam jangka pendek.

Dengan menerapkan strategi dan tindakan yang tepat dalam mengelola likuiditas, operator-operator seluler dapat mengatasi tantangan finansial dan memastikan kelangsungan operasional mereka. Dalam kondisi industri yang kompetitif dan berubah-ubah, manajemen likuiditas yang baik akan menjadi kunci keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang bagi operator-operator seluler.

2) Cash Ratio

Dalam analisis likuiditas operator seluler, rasio kas atau cash ratio menjadi salah satu indikator penting. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan kas dan setara kas yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dalam laporan ini, kami akan menganalisis hasil rasio kas dari tiga operator seluler, yaitu Indosat, Smartfren, dan Telkomsel. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai kesehatan likuiditas dari ketiga operator tersebut. Rasio Kas atau Cash Ratio adalah rasio yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan uang kas dan setara kas yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Standarnya yaitu 50%. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Standar Industri	50%
------------------	-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	CASH RATIO (50%)				KESIMPULAN	
		2018	2019	2020	2021		
1	INDOSAT	4,97%	26,58%	7,87%	13,22%	0	TIDAK SEHAT
2	SMARTFREN	6,64%	3,22%	7,77%	4,82%	0	TIDAK SEHAT
3	TELKOMSEL	31,33%	41,08%	31,57%	8,74%	0	TIDAK SEHAT

Berikut Skala Tidak Sehat:

NO	NAMA PERUSAHAAN	CASH RATIO (50%)							
		Ket.	2018	Ket.	2019	Ket.	2020	ket.	2021
1	INDOSAT	SB	4,97%	S	26,58%	SB	7,87%	B	13,22%
2	SMARTFREN	SB	6,64%	SB	3,22%	SB	7,77%	SB	4,82%
3	TELKOMSEL	R	31,33%	SR	41,08%	R	31,57%	SB	8,74%

Keterangan:

SR	Sangat Ringan	40% – 49%
R	Ringan	30% – 39%
S	Sedang	20% – 29%
B	Berat	10% – 19%
SB	Sangat Berat	0,0% – 0,99%

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kas atau cash ratio, kami dapat melihat bahwa ketiga operator seluler yang dianalisis mengalami kondisi yang tidak sehat dari segi likuiditas.

1) Indosat.

Pada tahun 2018, rasio kas Indosat mencapai 4,97%, yang berada di bawah standar industri 50%. Angka ini menunjukkan bahwa Indosat memiliki keterbatasan dalam menggunakan kas dan setara kas untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Selama periode 2019 hingga 2021, rasio kas Indosat masih tetap di bawah standar industri, dengan tingkat yang bervariasi. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mengelola likuiditasnya.

2) Smartfren.

Rasio kas Smartfren juga menunjukkan kondisi yang tidak sehat selama periode yang dianalisis. Pada tahun 2018, rasio kas Smartfren mencapai 6,64%, yang berada di bawah standar industri. Selama periode 2019 hingga 2021, rasio kas Smartfren terus menurun dan tetap berada di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa Smartfren mengalami kesulitan dalam menggunakan kas dan setara kas untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya.

3) Telkomsel.

Telkomsel menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal rasio kas dibandingkan dengan Indosat dan Smartfren. Pada tahun 2018, rasio kas Telkomsel mencapai 31,33%, yang berada di atas standar industri 50%. Namun, selama periode 2019 hingga 2021, rasio kas Telkomsel menurun secara signifikan dan berada di bawah standar industri. Meskipun demikian, Telkomsel masih memiliki kondisi likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan dua operator lainnya.

Berdasarkan hasil analisis rasio kas atau cash ratio, dapat disimpulkan bahwa ketiga operator seluler yang dianalisis, yaitu Indosat, Smartfren, dan Telkomsel, menghadapi tantangan dalam mengelola likuiditas mereka. Kondisi likuiditas yang tidak sehat dapat menghambat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan manajemen likuiditas dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kesehatan keuangan dan kelangsungan operasional operator seluler tersebut.

3) Quick Ratio

Dalam analisis likuiditas operator seluler, rasio cepat atau quick ratio digunakan sebagai indikator penting. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang sangat lancar, seperti kas, sekuritas jangka pendek, dan piutang usaha. Dalam laporan ini, kami akan menganalisis hasil rasio cepat dari tiga operator seluler, yaitu Indosat, Smartfren, dan Telkomsel. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran mengenai kesehatan likuiditas dari ketiga operator tersebut.

Rasio Cepat atau quick ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang lancar atau kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva atau asset yang sangat lancar seperti kas, sekuritas jangka pendek dan piutang. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas + Sekuritas Jangka Pendek + Piutang Usaha}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Standar Industri	1 Kali
------------------	--------

NO	NAMA PERUSAHAAN	Quick Ratio				KESIMPULAN	
		2018	2019	2020	2021		
1	INDOSAT	0,19	0,40	0,19	0,20	0	TIDAK SEHAT
2	SMARTFREN	0,08	0,04	0,10	0,06	0	TIDAK SEHAT
3	TELKOMSEL	0,42	0,49	0,35	0,12	0	TIDAK SEHAT

Berikut Skala Tidak Sehat:

NO	NAMA PERUSAHAAN	QUICK RASIO (1)							
		Ket.	2018	Ket.	2019	Ket.	2020	Ket.	2021
1	INDOSAT	SB	0,19	B	0,40	SB	0,19	SB	0,20
2	SMARTFREN	SB	0,08	SB	0,04	SB	0,10	SB	0,06
3	TELKOMSEL	S	0,42	S	0,49	B	0,35	SB	0,12

Keterangan:

SR	Sangat Ringan	0,81 – 0,99
R	Ringan	0,61 – 0,80
S	Sedang	0,41 – 0,60
B	Berat	0,21 – 0,40

SB	Sangat Berat	0,0 – 0,20
----	--------------	------------

Berdasarkan hasil perhitungan rasio cepat atau quick ratio, kami dapat melihat bahwa ketiga operator seluler yang dianalisis mengalami kondisi yang tidak sehat dari segi likuiditas.

- 1) Indosat. Pada tahun 2018, rasio cepat Indosat mencapai 0,19, yang berada di bawah standar industri 1 kali. Angka ini menunjukkan bahwa Indosat memiliki keterbatasan dalam menggunakan aktiva yang sangat lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Selama periode 2019 hingga 2021, rasio cepat Indosat tetap berada di bawah standar industri, dengan tingkat yang bervariasi. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mengelola likuiditasnya.
- 2) Smartfren. Rasio cepat Smartfren juga menunjukkan kondisi yang tidak sehat selama periode yang dianalisis. Pada tahun 2018, rasio cepat Smartfren hanya mencapai 0,08, yang jauh di bawah standar industri. Selama periode 2019 hingga 2021, rasio cepat Smartfren tetap berada di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa Smartfren mengalami kesulitan dalam menggunakan aktiva yang sangat lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- 3) Telkomsel. Telkomsel menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal rasio cepat dibandingkan dengan Indosat dan Smartfren. Pada tahun 2018, rasio cepat Telkomsel mencapai 0,42, yang berada di atas standar industri 1 kali. Namun, selama periode 2019 hingga 2021, rasio cepat Telkomsel mengalami penurunan yang signifikan dan berada di bawah standar industri. Meskipun demikian, Telkomsel masih memiliki kondisi likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan dua operator lainnya.

Berdasarkan hasil analisis rasio cepat atau quick ratio, dapat disimpulkan bahwa ketiga operator seluler yang dianalisis, yaitu Indosat, Smartfren, dan Telkomsel, menghadapi tantangan dalam mengelola likuiditas mereka. Kondisi likuiditas yang tidak sehat dapat menghambat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan manajemen likuiditas dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kesehatan keuangan dan kelangsungan operasional. Dalam hal ini, operator seluler perlu memperhatikan beberapa langkah strategis untuk mengatasi tantangan likuiditas yang dihadapi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan pengelolaan kas: Operator seluler perlu mengoptimalkan manajemen kas mereka dengan memantau aliran kas masuk dan keluar secara cermat. Hal ini meliputi pengelolaan pembayaran pelanggan, pengendalian biaya operasional, dan pengaturan kebijakan pembayaran kepada pemasok.
- 2) Mengoptimalkan siklus konversi kas: Operator seluler dapat meningkatkan likuiditas mereka dengan mengurangi siklus konversi kas, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan atau piutang menjadi kas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola persediaan secara efisien dan mempercepat proses penagihan kepada pelanggan.
- 3) Mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif: Dalam situasi likuiditas yang sulit, operator seluler dapat menjajaki sumber pembiayaan alternatif seperti pinjaman bank, investasi langsung, atau kerjasama dengan mitra strategis. Penting bagi operator seluler untuk mempertimbangkan biaya dan risiko yang terkait dengan sumber pembiayaan tersebut.
- 4) Mengoptimalkan struktur modal: Operator seluler perlu memperhatikan struktur modal mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan likuiditas. Ini melibatkan penilaian kembali hutang yang ada dan pertimbangan terhadap tingkat bunga, jadwal pembayaran, dan restrukturisasi hutang jika diperlukan.
- 5) Meningkatkan efisiensi operasional: Operator seluler harus terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Hal ini dapat membantu mengurangi beban biaya dan meningkatkan aliran kas positif.

4) Cash Turn Over

Dalam analisis likuiditas operator telekomunikasi, rasio Cash Turn Over merupakan salah satu indikator yang penting untuk memahami tingkat ketersediaan kas dalam membayar utang dan beban-beban terkait dengan penjualan perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan kas dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam laporan kajian ini, hasil perhitungan rasio Cash Turn Over untuk tiga operator seluler yaitu Indosat, Smartfren, dan Telkomsel akan dianalisis. Rasio Perputaran Kas atau Cash Turn Over adalah rasio yang digunakan sebagai pengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar seluruh utang dan beban-beban yang terkait dengan penjualan perusahaan. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

Standar Industri	10 Kali
------------------	---------

NO	NAMA PERUSAHAAN	Cash Turn Over				KESIMPULAN	
		2018	2019	2020	2021		
1	INDOSAT	-1,76	-2,70	-2,14	-1,83	0	TIDAK SEHAT
2	SMARTFREN	-1,33	-1,61	-1,63	-1,44	0	TIDAK SEHAT
3	TELKOMSEL	-22,88	-40,76	-9,16	-4,52	0	TIDAK SEHAT

Berikut Skala Tidak Sehat:

NO	NAMA PERUSAHAAN	CASH TURN OVER (10)							
		Ket.	2018	Ket.	2019	Ket.	2020	Ket.	2021
1	INDOSAT	SB	-1,76	SB	-2,70	SB	-2,14	SB	-1,83
2	SMARTFREN	SB	-1,33	SB	-1,61	SB	-1,63	SB	-1,44
3	TELKOMSEL	SB	-22,88	SB	-40,76	SB	-9,16	SB	-4,52

Keterangan:

SR	Sangat Ringan	8,1 – 9,9
R	Ringan	6,1 – 8,0
S	Sedang	4,1 – 6,0
B	Berat	2,1 – 4,0
SB	Sangat Berat	< 2

Berdasarkan hasil pengukuran rasio Cash Turn Over, ketiga operator seluler menunjukkan angka yang negatif sepanjang tahun 2018 hingga 2021. Angka negatif ini menunjukkan bahwa pendapatan bersih yang dihasilkan tidak mencukupi untuk menutupi modal kerja bersih. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan kas dan penggunaan sumber daya perusahaan.

Indosat, Smartfren, dan Telkomsel menunjukkan kinerja yang tidak sehat dalam hal perputaran kas. Ketiga operator seluler ini memiliki rasio Cash Turn Over yang sangat rendah, bahkan negatif, sepanjang periode yang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa operator-operator ini

mengalami kesulitan dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi beban operasional dan membayar utang dengan menggunakan kas yang tersedia.

Penurunan kinerja rasio Cash Turn Over yang terus-menerus dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan pendapatan, pengelolaan kas yang tidak efisien, dan tingginya beban operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah likuiditas yang serius dalam operasional perusahaan.

Dalam menghadapi kondisi ini, operator seluler perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pengelolaan kas mereka, termasuk pengelolaan pendapatan dan pengendalian beban operasional. Mereka juga perlu mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan perputaran kas, seperti memperbaiki kebijakan penagihan kepada pelanggan, mengurangi beban operasional yang tidak efektif, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Analisis rasio Cash Turn Over ini menggarisbawahi pentingnya manajemen kas yang efisien dalam menjaga likuiditas perusahaan. Operator seluler harus memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan cukup untuk menutupi beban operasional dan membayar utang dengan menggunakan kas yang ada. Dalam kondisi likuiditas yang baik, operator seluler dapat menjaga kelangsungan operasional mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan industri telekomunikasi secara keseluruhan. Dengan memperbaiki manajemen kas dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, operator seluler dapat meningkatkan perputaran kas dan mengatasi masalah likuiditas yang dihadapi.

Pentingnya pemantauan dan pengendalian terhadap arus kas operasional juga menjadi sorotan dalam analisis likuiditas ini. Dengan memahami aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasional perusahaan, operator seluler dapat mengidentifikasi potensi masalah likuiditas dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Analisis arus kas operasional yang positif menunjukkan bahwa operator mampu menghasilkan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, sementara arus kas operasional negatif dapat mengindikasikan masalah likuiditas yang perlu ditangani.

Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi faktor kunci dalam mengelola likuiditas operator seluler. Dengan memantau dan mengendalikan aliran kas masuk dan keluar, serta melakukan proyeksi pendapatan dan biaya, operator seluler dapat mengantisipasi tantangan likuiditas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional. Dalam perencanaan keuangan yang matang, operator seluler juga perlu

mempertimbangkan pengaturan pembiayaan yang tepat agar dana yang cukup tersedia dalam jangka pendek.

Kebijakan pembayaran yang fleksibel dan pembiayaan yang tepat juga berperan penting dalam mengelola likuiditas operator seluler. Dengan menetapkan kebijakan pembayaran yang efektif, seperti diskon pembayaran dini atau skema cicilan yang menguntungkan, operator seluler dapat memperbaiki arus kas masuk. Selain itu, pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan membantu memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam jangka pendek.

Hasil analisis likuiditas operator seluler menunjukkan bahwa beberapa operator menghadapi tantangan likuiditas yang perlu ditangani. Rasio likuiditas, seperti Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, dan Cash Turn Over, memberikan gambaran tentang kinerja keuangan operator dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengelola kas dengan efisien. Penting bagi operator seluler untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas mereka, termasuk manajemen kas, arus kas operasional, perencanaan keuangan, kebijakan pembayaran, dan pembiayaan. Dengan tindakan yang tepat dan strategi yang matang, operator seluler dapat memperbaiki likuiditas mereka, menjaga kelangsungan operasional, dan berkontribusi pada pertumbuhan industri telekomunikasi secara keseluruhan.

3.3.2 Hasil analisis untuk UMKM Seluler

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat total 48 perusahaan non-UMKM yang menjadi objek kajian. Namun, hanya 31 perusahaan yang dapat diolah data keuangannya, sedangkan 17 perusahaan non-UMKM tidak dapat diolah karena berbagai alasan seperti tidak tersedianya laporan keuangan pada tahun tertentu atau ketidaklengkapan data.

No	Nama PT.	Keterangan
1	IFORTE SOLUSI INFOTEK	Tidak terdapat LK tahun 2021
2	LINK NET	Tidak terdapat LK tahun 2021
3	MORA TELEMATIKA INDONESIA	Tidak terdapat LK tahun 2021
4	LINTASARTA	Tidak terdapat LK 2018
5	CYBERINDO ADITAMA	Tidak terdapat LK 2018
6	INDONESIA COMNETS PLUS	Tidak terdapat LK 2021

7	BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI	LK 2018 & 2019 tidak jelas
8	CITRA JELAJAH INFORMATIKA	LK tahun 2020 tidak ada neraca
9	DETIK INI JUGA	Hanya LK 2018 yang ada neraca
10	INDOTRANS DATA	LK 2020 & 2021 tidak lengkap
11	JEMBATAN CITRA NUSANTARA	Tidak terdapat LK tahun 2018
12	MEDIA JARINGAN INDONESIA	Data tahun 2018 & 2019 sama nominalnya, LK 2020 & 2021 tidak lengkap datanya
13	MSH NIAGA TELECOM INDONESIA	LK Tahun 2018 belum lengkap hanya ada laporan laba/rugi
14	SATNETCOM BALIKPAPAN	LK Tahun 2018 & 2021 belum lengkap hanya ada laporan laba/rugi
15	SELARAS CITRA TERABIT	LK Tahun 2020 belum lengkap hanya ada laporan laba/rugi
16	TIGATRA INFOKOM	LK Tahun 2021 belum lengkap hanya ada laporan laba/rugi
17	WINET MEDIA PERSADA	LK Tahun 2018 & 2020 belum lengkap hanya ada laporan laba/rugi

Dalam konteks kajian ini, ketidakmampuan mengolah data keuangan dari 17 perusahaan non-UMKM ini dapat mempengaruhi keseluruhan analisis dan hasil yang diperoleh. Dalam melakukan kajian yang komprehensif, penting untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan likuiditas operator telekomunikasi. Dalam proses kajian ini, perlu dilakukan upaya tambahan untuk memperoleh data keuangan yang lengkap dari perusahaan-perusahaan yang belum tersedia. Hal ini penting untuk memastikan hasil analisis yang lebih akurat dan representatif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah menghubungi perusahaan-perusahaan terkait dan meminta klarifikasi mengenai ketidaklengkapan data keuangan yang tersedia, atau mencari sumber data alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti. Selain itu, dalam melakukan laporan kajian ini, hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 31 perusahaan non-UMKM yang data keuangannya dapat diolah juga dapat memberikan wawasan yang berharga. Dalam melihat hasil perhitungan rasio likuiditas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil.

1. Current Ratio

Dalam laporan kajian ini, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas pada 31 perusahaan non-UMKM dalam periode 2018 hingga 2021. Rasio likuiditas yang diukur adalah Current Ratio, yang merupakan indikator likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu,

juga dilakukan penilaian terhadap Current Ratio tersebut dengan menggunakan skala penilaian likuiditas.

Rasio Lancar atau Current Ratio adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan (necara) likuiditas perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode pelaporan. Standarnya yaitu 1 kali. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar (Current Assets)}}{\text{Kewajiban Lancar (Current Liabilities)}}$$

Standar Industri	1 Kali
------------------	--------

Hasil dari LK NON UMKM:

NO	NAMA PERUSAHAAN	CURRENT RATIO					KESIMPULAN
		2018	2019	2020	2021		
1	TELEKOM INDONESIA INTERNATIONAL	1,06	1,03	1,18	1,37	6	SEHAT
2	BALI TOWERINDO SENTRA	0,58	0,33	0,58	0,66	0	TIDAK SEHAT
3	EKA MAS REPUBLIK	0,20	0,46	0,45	1,04	1	TIDAK SEHAT
4	MEGA AKSES PERSADA	1,67	5,40	1,93	1,22	4	SEHAT
5	PSN ENAM INDONESIA	2.257,20	0,76	1,29	1,61	3	SEHAT
6	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	2,44	2,15	1,35	0,88	4	SEHAT
7	TELKOM SATELIT INDONESIA	1,49	1,28	1,31	1,41	4	SEHAT
8	AGUNG GEMILANG PERKASA	2,36	1,38	1,51	2,45	4	SEHAT
9	AKTIF TENGAH MALAM	1,05	1,72	3,64	2,62	4	SEHAT
10	ALITA PRAYA MITRA	1,08	1,17	0,94	0,91	3	SEHAT
11	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES	0,81	0,84	5,59	5,47	3	SEHAT
12	BAKRIE TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,02	0	TIDAK SEHAT
13	BERDIKARI PRIMA MANDIRI	0,17	0,15	0,65	1,13	1	TIDAK SEHAT
14	COMTELINDO	1,72	2,28	0,00	1,59	3	SEHAT
15	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	0,56	0,56	0,39	3,29	1	TIDAK SEHAT
16	DEWATA TELEMATIKA	0,52	3,34	2,08	4,0	3	SEHAT
17	FASTEL SARANA INDONESIA	3,50	1,59	0,95	0,46	3	SEHAT
18	FIRST MEDIA	0,07	0,07	0,04	0,04	0	TIDAK SEHAT

19	I FORTE GLOBAL INTERNET	0,61	1,26	0,66	1,58	2	SEHAT
20	INTERNUX	0,07	0,04	0,02	0,04	0	TIDAK SEHAT
21	JALAWAVE CAKRAWALA	7,69	6,87	11,00	5,36	4	SEHAT
22	MILLENIUM INTERNETINDO	2,53	1,87	2,57	10,18	4	SEHAT
23	MNC KABEL MEDIACOM	1,01	0,73	0,69	1,06	2	SEHAT
24	PASIFIKTEL INDOTAMA	2,31	1,74	1,63	2,07	4	SEHAT
25	PC24 CYBER INDONESIA	1,62	0,31	0,34	0,75	1	TIDAK SEHAT
26	PRESTASI PIRANTI INFORMASI	0,59	0,33	0,34	0,28	0	TIDAK SEHAT
27	SERPONG MAS TELEMATIKA	1,12	1,06	0,75	1,07	3	SEHAT
28	TIME EXCELINDO	2,62	-88,50	3,33	4,23	3	SEHAT
29	TOWER BERSAMA DAN ENTITAS	0,44	0,98	0,46	1,11	1	TIDAK SEHAT
30	UNINET MEDIA SAKTI	0,25	0,20	0,15	0,73	0	TIDAK SEHAT
31	VARNION TECHNOLOGY SEMESTA	0,99	1,00	0,99	1,14	2	SEHAT

Berikut Skala Tidak Sehat:

NO	NAMA PERUSAHAAN	CURRENT RATIO							
		Ket	2018	Ket	2019	Ket	2020	Ket	2021
1	TELEKOM INDONESIA INTERNATIONAL	SR	1,06	SR	1,03	SR	1,18	SR	1,37
2	BALI TOWERINDO SENTRA	S	0,58	SB	0,33	S	0,58	R	0,66
3	EKA MAS REPUBLIK	SB	0,20	S	0,46	S	0,45	SR	1,04
4	MEGA AKSES PERSADA	SR	1,67	SR	5,40	SR	1,93	SR	1,22
5	PSN ENAM INDONESIA	SR	2.257,20	R	0,76	SR	1,29	SR	1,61
6	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	SR	2,44	SR	2,15	SR	1,35	SB	0,88
7	TELKOM SATELIT INDONESIA	SR	1,49	SR	1,28	SR	1,31	SR	1,41
8	AGUNG GEMILANG PERKASA	SR	2,36	SR	1,38	SR	1,51	SR	2,45
9	AKTIF TENGAH MALAM	SR	1,05	SR	1,72	SR	3,64	SR	2,62
10	ALITA PRAYA MITRA	SR	1,08	SR	1,17	SR	0,94	SR	0,91
11	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES	SB	0,81	SB	0,84	SR	5,59	SR	5,47
12	BAKRIE TELECOM	SB	0,00	SB	0,00	SB	0,00	SB	0,02

13	BERDIKARI PRIMA MANDIRI	SB	0,17	SB	0,15	R	0,65	SR	1,13
14	COMTELINDO	SR	1,72	SR	2,28	SB	0,00	SR	1,59
15	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	S	0,56	S	0,56	SB	0,39	SR	3,29
16	DEWATA TELEMATIKA	S	0,52	SR	3,34	SR	2,08	SR	4,0
17	FASTEL SARANA INDONESIA	SR	3,50	SR	1,59	SR	0,95	S	0,46
18	FIRST MEDIA	SB	0,07	SB	0,07	SB	0,04	SB	0,04
19	I FORTE GLOBAL INTERNET	R	0,61	SR	1,26	R	0,66	SR	1,58
20	INTERNUX	SB	0,07	SB	0,04	SB	0,02	SB	0,04
21	JALAWAVE CAKRAWALA	SR	7,69	SR	6,87	SR	11,00	SR	5,36
22	MILLENIUM INTERNETINDO	SR	2,53	SR	1,87	SR	2,57	SR	10,18
23	MNC KABEL MEDIACOM	SR	1,01	R	0,73	R	0,69	SR	1,06
24	PASIFIKTEL INDOTAMA	SR	2,31	SR	1,74	SR	1,63	SR	2,07
25	PC24 CYBER INDONESIA	SR	1,62	SB	0,31	SB	0,34	R	0,75
26	PRESTASI PIRANTI INFORMASI	S	0,59	SB	0,33	SB	0,34	SB	0,28
27	SERPONG MAS TELEMATIKA	SR	1,12	SR	1,06	R	0,75	SR	1,07
28	TIME EXCELINDO	SR	2,62	SB	-88,50	SR	3,33	SR	4,23
29	TOWER BERSAMA DAN ENTITAS	S	0,44	SR	0,98	S	0,46	SR	1,11
30	UNINET MEDIA SAKTI	SB	0,25	SB	0,20	SB	0,15	R	0,73
31	VARNION TECHNOLOGY SEMESTA	SR	0,99	SR	1,00	SR	0,99	SR	1,14

Keterangan:

SR	Sangat Ringan	0,81 – 0,99
R	Ringan	0,61 – 0,80
S	Sedang	0,41 – 0,60
B	Berat	0,21 – 0,40
SB	Sangat Berat	0,0 – 0,20

Dari hasil perhitungan Current Ratio, diketahui bahwa sebagian besar perusahaan non-UMKM memiliki rasio likuiditas yang sehat. Rasio likuiditas di atas 1 kali menunjukkan bahwa perusahaan

memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang memiliki Current Ratio di bawah 1 kali, yang menandakan adanya keterbatasan likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan-perusahaan ini perlu melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki likuiditasnya.

Berdasarkan skala penilaian likuiditas, sebagian besar perusahaan non-UMKM masuk ke dalam kategori "sehat" dengan Current Ratio yang berada di antara 1,01 hingga 1,37. Beberapa perusahaan juga masuk ke dalam kategori "ringan" dengan Current Ratio di bawah 1, namun masih di atas 0,80. Meskipun demikian, terdapat beberapa perusahaan yang masuk ke dalam kategori "berat" dengan Current Ratio di bawah 0,40. Perusahaan-perusahaan ini perlu melakukan perbaikan dalam mengelola aset lancar dan kewajiban lancar guna memperbaiki likuiditasnya.

Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas pada perusahaan non-UMKM dalam periode 2018 hingga 2021, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki likuiditas yang sehat. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar untuk meningkatkan likuiditas mereka.

Selain itu, laporan ini juga memberikan gambaran mengenai skala penilaian likuiditas yang digunakan untuk mengevaluasi hasil perhitungan rasio likuiditas. Dengan menggunakan skala tersebut, dapat diidentifikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki likuiditas yang sehat serta perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan perbaikan dalam mengelola likuiditasnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan perusahaan, memahami dan menganalisis rasio likuiditas menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah likuiditas yang mungkin terjadi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam mengelola aset dan kewajiban jangka pendek guna memastikan kelangsungan operasional yang baik.

2. Cash Ratio

Hasil perhitungan Cash Ratio pada 31 perusahaan non-UMKM dalam periode 2018 hingga 2021 mengungkapkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan uang kas dan setara kas yang tersedia.

Rasio Kas atau Cash Ratio adalah rasio yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan uang kas dan setara kas yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Standarnya yaitu 50%. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Standar Industri	50%
------------------	-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	CASH RATIO (50%)				KESIMPULAN	
		2018	2019	2020	2021		
1	TELEKOM INDONESIA INTERNATIONAL	0,37	0,31	0,34	0,51	2	SEHAT
2	BALI TOWERINDO SENTRA	0,04	0,02	0,15	0,19	0	TIDAK SEHAT
3	EKA MAS REPUBLIK	0,03	0,00	0,15	0,37	0	TIDAK SEHAT
4	MEGA AKSES PERSADA	0,78	2,04	0,24	0,31	3	SEHAT
5	PSN ENAM INDONESIA	2.223,86	0,65	1,03	12,89	4	SEHAT
6	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	1,06	0,00	0,89	0,50	4	SEHAT
7	TELKOM SATELIT INDONESIA	0,05	0,16	0,34	0,31	0	TIDAK SEHAT
8	AGUNG GEMILANG PERKASA	0,86	0,17	0,34	0,82	2	SEHAT
9	AKTIF TENGAH MALAM	0,12	0,42	1,85	1,88	2	SEHAT
10	ALITA PRAYA MITRA	0,05	0,36	0,38	0,34	0	TIDAK SEHAT
11	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES	0,30	0,35	3,28	3,50	2	SEHAT
12	BAKRIE TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0	TIDAK SEHAT
13	BERDIKARI PRIMA MANDIRI	0,09	0,06	0,10	0,07	0	TIDAK SEHAT
14	COMTELINDO	0,45	0,47	0,00	0,31	0	TIDAK SEHAT
15	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	0,08	0,07	0,07	3,0	1	TIDAK SEHAT
16	DEWATA TELEMATIKA	0,19	1,39	1,17	2,7	3	SEHAT
17	FASTEL SARANA INDONESIA	0,98	0,44	0,21	0,13	1	TIDAK SEHAT
18	FIRST MEDIA	0,04	0,04	0,03	0,03	0	TIDAK SEHAT
19	I FORTE GLOBAL INTERNET	0,33	0,46	0,32	1,30	1	TIDAK SEHAT

20	INTERNUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0	TIDAK SEHAT
21	JALAWAVE CAKRAWALA	0,27	0,07	0,11	0,04	0	TIDAK SEHAT
22	MILLENIUM INTERNETINDO	0,25	0,24	0,96	0,79	2	SEHAT
23	MNC KABEL MEDIACOM	0,01	0,01	0,02	0,00	0	TIDAK SEHAT
24	PASIFIKTEL INDOTAMA	1,05	0,12	0,94	1,29	3	SEHAT
25	PC24 CYBER INDONESIA	0,64	0,05	0,10	0,37	1	TIDAK SEHAT
26	PRESTASI PIRANTI INFORMASI	0,01	0,01	0,01	0,02	0	TIDAK SEHAT
27	SERPONG MAS TELEMATIKA	0,10	0,06	0,17	0,20	0	TIDAK SEHAT
28	TIME EXCELINDO	2,35	-44,49	1,12	1,24	3	SEHAT
29	TOWER BERSAMA DAN ENTITAS	0,02	0,19	0,14	0,21	0	TIDAK SEHAT
30	UNINET MEDIA SAKTI	0,01	0,01	0,13	0,09	0	TIDAK SEHAT
31	VARNION TECHNOLOGY SEMESTA	0,04	0,07	0,03	0,01	0	TIDAK SEHAT

Berikut Skala Tidak Sehat:

NO	PERUSAHAAN	CASH RATIO (50%)							
		Ket	2018	Ket	2019	Ket	2020	Ket	2021
1	TELEKOM INDONESIA INTERNATIONAL	R	0,37	R	0,31	R	0,34	SEHAT	0,51
2	BALI TOWERINDO SENTRA	SB	0,04	SB	0,02	B	0,15	FALSE	0,19
3	EKA MAS REPUBLIK	SB	0,03	SB	0,00	B	0,15	R	0,37
4	MEGA AKSES PERSADA	SEHAT	0,78	SEHAT	2,04	S	0,24	R	0,31
5	PSN ENAM INDONESIA	SEHAT	2.223,86	SEHAT	0,65	SEHAT	1,03	SEHAT	12,89
6	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	SEHAT	1,06	SB	0,00	SEHAT	0,89	SEHAT	0,50
7	TELKOM SATELIT INDONESIA	SB	0,05	B	0,16	R	0,34	R	0,31
8	AGUNG GEMILANG PERKASA	SEHAT	0,86	B	0,17	R	0,34	SEHAT	0,82
9	AKTIF TENGAH MALAM	B	0,12	SR	0,42	SEHAT	1,85	SEHAT	1,88
10	ALITA PRAYA MITRA	SB	0,05	R	0,36	R	0,38	R	0,34
11	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES	R	0,30	R	0,35	SEHAT	3,28	SEHAT	3,50
12	BAKRIE TELECOM	SB	0,00	SB	0,00	SB	0,00	SB	0,00
13	BERDIKARI PRIMA MANDIRI	SB	0,09	SB	0,06	B	0,10	SB	0,07

14	COMTELINDO	SR	0,45	SR	0,47	SB	0,00	R	0,31
15	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	SB	0,08	SB	0,07	SB	0,07	SEHAT	3,0
16	DEWATA TELEMATIKA	FALSE	0,19	SEHAT	1,39	SEHAT	1,17	SEHAT	2,7
17	FASTEL SARANA INDONESIA	SEHAT	0,98	SR	0,44	S	0,21	B	0,13
18	FIRST MEDIA	SB	0,04	SB	0,04	SB	0,03	SB	0,03
19	I FORTE GLOBAL INTERNET	R	0,33	SR	0,46	R	0,32	SEHAT	1,30
20	INTERNUX	SB	0,00	SB	0,00	SB	0,00	SB	0,00
21	JALAWAVE CAKRAWALA	S	0,27	SB	0,07	B	0,11	SB	0,04
22	MILLENIUM INTERNETINDO	S	0,25	S	0,24	SEHAT	0,96	SEHAT	0,79
23	MNC KABEL MEDIACOM	SB	0,01	SB	0,01	SB	0,02	SB	0,00
24	PASIFIKTEL INDOTAMA	SEHAT	1,05	B	0,12	SEHAT	0,94	SEHAT	1,29
25	PC24 CYBER INDONESIA	SEHAT	0,64	SB	0,05	SB	0,10	R	0,37
26	PRESTASI PIRANTI INFORMASI	SB	0,01	SB	0,01	SB	0,01	SB	0,02
27	SERPONG MAS TELEMATIKA	SB	0,10	SB	0,06	B	0,17	S	0,20
28	TIME EXCELINDO	SEHAT	2,35	SB	- 44,49	SEHAT	1,12	SEHAT	1,24
29	TOWER BERSAMA DAN ENTITAS	SB	0,02	SB	0,19	B	0,14	S	0,21
30	UNINET MEDIA SAKTI	SB	0,01	SB	0,01	B	0,13	SB	0,09
31	VARNION TECHNOLOGY SEMESTA	SB	0,04	SB	0,07	SB	0,03	SB	0,01

Keterangan:

SR	Sangat Ringan	40% – 49%
R	Ringan	30% – 39%
S	Sedang	20% – 29%
B	Berat	10% – 19%
SB	Sangat Berat	0,0% – 0,99%

Berdasarkan hasil perhitungan Cash Ratio, terlihat variasi yang signifikan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Beberapa perusahaan menunjukkan Cash Ratio yang sehat, yaitu di atas 50%, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, sebagian besar perusahaan memiliki Cash Ratio di bawah standar industri, yang menunjukkan keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk menutupi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan skala penilaian Cash Ratio, sebagian besar perusahaan non-UMKM masuk ke dalam kategori "tidak sehat" dengan Cash Ratio di bawah 50%. Beberapa perusahaan masuk ke dalam kategori "berat" dengan Cash Ratio di bawah 20%, menunjukkan tingkat keterbatasan yang signifikan dalam kemampuan mereka untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Sebaliknya, terdapat beberapa perusahaan yang masuk ke dalam kategori "ringan" dengan Cash Ratio di antara 30% hingga 39%, namun masih di bawah standar industri. Perusahaan-perusahaan ini perlu meningkatkan kemampuan likuiditas mereka untuk menghadapi kewajiban jangka pendek.

Secara keseluruhan, hasil analisis Cash Ratio menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan non-UMKM menghadapi tantangan dalam menutupi kewajiban jangka pendek dengan uang kas dan setara kas yang tersedia. Hal ini dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi perusahaan tersebut, terutama jika terjadi keadaan darurat atau tekanan keuangan yang tidak terduga. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini perlu memperhatikan dan meningkatkan manajemen kas serta sumber daya likuiditas mereka untuk memastikan kelangsungan operasional yang stabil.

Penting bagi perusahaan non-UMKM untuk memiliki cadangan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menghadapi kemungkinan peristiwa tak terduga. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan kas yang efektif, seperti mengoptimalkan pengumpulan piutang, mengelola persediaan dengan efisien, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan solusi finansial seperti memperoleh pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kebutuhan kas yang mendesak.

3. Quick Ratio

Rasio Quick Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang sangat likuid, seperti kas, sekuritas jangka pendek, dan piutang usaha. Standar industri untuk Quick Ratio adalah 1 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan diharapkan memiliki aset likuid yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek mereka. Dalam analisis berikut, kami akan menganalisis hasil perhitungan Quick Ratio untuk 31 perusahaan non-UMKM dari tahun 2018 hingga 2021.

Rasio Cepat atau quick ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang lancar atau kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan

aktiva atau asset yang sangat lancar seperti kas, sekuritas jangka pendek dan piutang. Standarnya yaitu 1 kali. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas + Sekuritas Jangka Pendek + Piutang Usaha}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Standar Industri	1 Kali
------------------	--------

NO	NAMA PERUSAHAAN	QUICK RATIO (1)				KESIMPULAN	
		2018	2019	2020	2021		
1	TELEKOM INDONESIA INTERNATIONAL	0,89	0,88	1,00	1,17	2	SEHAT
2	BALI TOWERINDO SENTRA	0,28	0,14	0,36	0,46	0	TIDAK SEHAT
3	EKA MAS REPUBLIK	0,10	0,07	0,27	0,55	0	TIDAK SEHAT
4	MEGA AKSES PERSADA	1,25	3,98	1,34	1,01	5	SEHAT
5	PSN ENAM INDONESIA	2.223,86	0,76	1,18	13,11	3	SEHAT
6	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	1,88	7,39	1,20	0,60	4	SEHAT
7	TELKOM SATELIT INDONESIA	1,03	1,06	1,18	1,30	4	SEHAT
8	AGUNG GEMILANG PERKASA	1,39	0,28	0,72	1,12	2	SEHAT
9	AKTIF TENGAH MALAM	0,91	1,44	3,18	2,32	3	SEHAT
10	ALITA PRAYA MITRA	0,68	0,63	0,55	0,55	0	TIDAK SEHAT
11	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES	0,70	0,76	5,22	5,08	2	SEHAT
12	BAKRIE TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,02	0	TIDAK SEHAT
13	BERDIKARI PRIMA MANDIRI	0,17	0,15	0,65	1,13	1	TIDAK SEHAT
14	COMTELINDO	1,28	1,13	15,30	0,98	3	SEHAT
15	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	0,36	0,31	0,26	3,13	1	TIDAK SEHAT
16	DEWATA TELEMATIKA	0,47	1,87	1,93	3,03	3	SEHAT
17	FASTEL SARANA INDONESIA	1,17	0,61	0,46	0,20	1	TIDAK SEHAT
18	FIRST MEDIA	0,06	0,06	0,03	0,04	0	TIDAK SEHAT
19	I FORTE GLOBAL INTERNET	0,54	1,01	0,58	1,57	2	SEHAT
20	INTERNUX	0,01	0,01	0,00	0,00	0	TIDAK SEHAT
21	JALAWAVE CAKRAWALA	2,54	2,82	4,06	1,98	4	SEHAT
22	MILLENIUM INTERNETINDO	2,12	0,97	2,03	7,91	3	SEHAT
23	MNC KABEL MEDIACOM	0,12	0,11	0,11	0,10	0	TIDAK SEHAT
24	PASIFIKTEL INDOTAMA	2,22	1,65	1,56	1,98	4	SEHAT

25	PC24 CYBER INDONESIA	1,60	0,09	0,21	0,62	1	TIDAK SEHAT
26	PRESTASI PIRANTI INFORMASI	0,07	0,13	0,19	0,20	0	TIDAK SEHAT
27	SERPONG MAS TELEMATIKA	0,46	0,66	0,47	0,90	0	TIDAK SEHAT
28	TIME EXCELINDO	2,38	-77,74	3,11	4,47	3	SEHAT
29	TOWER BERSAMA DAN ENTITAS	0,07	0,32	0,20	0,39	0	TIDAK SEHAT
30	UNINET MEDIA SAKTI	0,18	0,15	0,15	0,56	0	TIDAK SEHAT
31	VARNION TECHNOLOGY SEMESTA	0,24	0,21	0,14	0,13	0	TIDAK SEHAT

Berdasarkan hasil perhitungan Quick Ratio, terlihat variasi yang signifikan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Beberapa perusahaan menunjukkan Quick Ratio yang sehat, yaitu di atas standar industri 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki aset likuid yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek mereka. Sementara itu, sebagian besar perusahaan memiliki Quick Ratio di bawah standar industri, yang menunjukkan keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk membayar kewajiban jangka pendek.

NO	PERUSAHAAN	QUICK RATIO (1)							
		Ket	2018	Ket	2019	Ket	2020	Ket	2021
1	TELEKOM INDONESIA INTERNATIONAL	SR	0,89	SR	0,88	SR	1,00	SEHAT	1,17
2	BALI TOWERINDO SENTRA	B	0,28	SB	0,14	B	0,36	S	0,46
3	EKA MAS REPUBLIK	SB	0,10	SB	0,07	B	0,27	S	0,55
4	MEGA AKSES PERSADA	SEHAT	1,25	SEHAT	3,98	SEHAT	1,34	SEHAT	1,01
5	PSN ENAM INDONESIA	SEHAT	2.223,86	R	0,76	SEHAT	1,18	SEHAT	13,11
6	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	SEHAT	1,88	SEHAT	7,39	SEHAT	1,20	S	0,60
7	TELKOM SATELIT INDONESIA	SEHAT	1,03	SEHAT	1,06	SEHAT	1,18	SEHAT	1,30
8	AGUNG GEMILANG PERKASA	SEHAT	1,39	B	0,28	R	0,72	SEHAT	1,12
9	AKTIF TENGAH MALAM	SR	0,91	SEHAT	1,44	SEHAT	3,18	SEHAT	2,32
10	ALITA PRAYA MITRA	R	0,68	R	0,63	S	0,55	S	0,55
11	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES	R	0,70	R	0,76	SEHAT	5,22	SEHAT	5,08
12	BAKRIE TELECOM	SB	0,00	SB	0,00	SB	0,00	SB	0,02
13	BERDIKARI PRIMA MANDIRI	SB	0,17	SB	0,15	R	0,65	SEHAT	1,13
14	COMTELINDO	SEHAT	1,28	SEHAT	1,13	SEHAT	15,30	SR	0,98
15	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	B	0,36	B	0,31	B	0,26	SEHAT	3,13
16	DEWATA TELEMATIKA	S	0,47	SEHAT	1,87	SEHAT	1,93	SEHAT	3,03

17	FASTEL SARANA INDONESIA	SEHAT	1,17	R	0,61	S	0,46	SB	0,20
18	FIRST MEDIA	SB	0,06	SB	0,06	SB	0,03	SB	0,04
19	I FORTE GLOBAL INTERNET	S	0,54	SEHAT	1,01	S	0,58	SEHAT	1,57
20	INTERNUX	SB	0,01	SB	0,01	SB	0,00	SB	0,00
21	JALAWAVE CAKRAWALA	SEHAT	2,54	SEHAT	2,82	SEHAT	4,06	SEHAT	1,98
22	MILLENIUUM INTERNETINDO	SEHAT	2,12	SR	0,97	SEHAT	2,03	SEHAT	7,91
23	MNC KABEL MEDIACOM	SB	0,12	SB	0,11	SB	0,11	SB	0,10
24	PASIFIKTEL INDOTAMA	SEHAT	2,22	SEHAT	1,65	SEHAT	1,56	SEHAT	1,98
25	PC24 CYBER INDONESIA	SEHAT	1,60	SB	0,09	B	0,21	R	0,62
26	PRESTASI PIRANTI INFORMASI	SB	0,07	SB	0,13	SB	0,19	SB	0,20
27	SERPONG MAS TELEMATIKA	S	0,46	R	0,66	S	0,47	SR	0,90
28	TIME EXCELINDO	SEHAT	2,38	SB	- 77,74	SEHAT	3,11	SEHAT	4,47
29	TOWER BERSAMA DAN ENTITAS	SB	0,07	B	0,32	SB	0,20	B	0,39
30	UNINET MEDIA SAKTI	SB	0,18	SB	0,15	SB	0,15	S	0,56
31	VARNION TECHNOLOGY SEMESTA	B	0,24	FALSE	0,21	SB	0,14	SB	0,13

Keterangan:

SR	Sangat Ringan	0,81 – 0,99
R	Ringan	0,61 – 0,80
S	Sedang	0,41 – 0,60
B	Berat	0,21 – 0,40
SB	Sangat Berat	0,0 – 0,20

1) Perusahaan dengan Quick Ratio Sehat.

Beberapa perusahaan seperti Telekom Indonesia International, Mega Akses Persada, dan Telkom Satelit Indonesia menunjukkan Quick Ratio yang sehat di atas 1 kali. Hal ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki cukup aset likuid, seperti kas, sekuritas jangka pendek, dan piutang usaha, untuk membayar kewajiban jangka pendek mereka. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban finansial mereka pada saat yang tepat.

2) Perusahaan dengan Quick Ratio Tidak Sehat

Sebagian besar perusahaan dalam contoh ini memiliki Quick Ratio di bawah standar industri 1 kali. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterbatasan

dalam kemampuan mereka untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset likuid yang dimiliki. Beberapa perusahaan bahkan memiliki Quick Ratio yang sangat rendah, menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi dan kemungkinan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka pada saat yang tepat.

3) Perusahaan dengan Perubahan Quick Ratio yang Signifikan:

Beberapa perusahaan, seperti Bali Towerindo Sentra dan Eka Mas Republik, menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam Quick Ratio dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini dapat mengindikasikan volatilitas dalam aset likuid perusahaan dan kemampuan mereka dalam mengelola kewajiban jangka pendek. Perusahaan-perusahaan ini perlu memperhatikan manajemen kas dan likuiditas mereka untuk menghindari risiko likuiditas yang tidak diinginkan.

4) Perusahaan dengan Quick Ratio Negatif atau Sangat Rendah

Beberapa perusahaan, seperti Bakrie Telecom dan Internux, memiliki Quick Ratio negatif atau sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki keterbatasan yang signifikan dalam kemampuan mereka untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset likuid yang dimiliki. Situasi ini menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi dan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial pada waktu yang tepat. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu melakukan perbaikan dalam manajemen kas dan likuiditas mereka, seperti meningkatkan arus kas yang masuk, mengurangi kewajiban jangka pendek, atau mencari sumber pendanaan tambahan untuk memperkuat posisi keuangan mereka.

5) Perusahaan dengan Quick Ratio yang Tinggi

Beberapa perusahaan, seperti PSN Enam Indonesia dan Supra Primatama Nusantara, menunjukkan Quick Ratio yang sangat tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya kelebihan aset likuid dalam perusahaan tersebut. Meskipun memiliki Quick Ratio yang tinggi bisa dianggap sebagai indikator likuiditas yang baik, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus memastikan bahwa aset likuid tersebut dioptimalkan dengan baik dan tidak mengalami idle atau tidak produktif.

Berdasarkan analisis Quick Ratio perusahaan-perusahaan yang tercantum, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek

mereka dengan menggunakan aset likuid yang dimiliki. Beberapa perusahaan menunjukkan kinerja yang baik dengan Quick Ratio yang sehat di atas standar industri, sementara yang lain memiliki Quick Ratio yang rendah atau negatif, menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi.

Perusahaan-perusahaan dengan Quick Ratio yang rendah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan dalam manajemen kas dan likuiditas mereka untuk mengurangi risiko likuiditas dan memastikan kelancaran kegiatan bisnis mereka. Upaya seperti meningkatkan arus kas, mengelola kewajiban jangka pendek dengan lebih efisien, atau mencari sumber pendanaan tambahan dapat membantu meningkatkan Quick Ratio mereka.

Dalam keseluruhan, Quick Ratio adalah salah satu rasio keuangan yang penting untuk diukur dan dipantau oleh perusahaan. Hal ini membantu perusahaan dalam memahami kemampuan mereka dalam membayar kewajiban jangka pendek dan mengelola likuiditas mereka dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa rasio keuangan hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan keuangan perusahaan, dan analisis yang lebih komprehensif diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan keuangan perusahaan.

4. Cash Turn Over

Dalam analisis keuangan, Cash Turn Over atau perputaran kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas dalam perusahaan untuk membayar utang dan beban-beban yang terkait dengan penjualan. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi pengelolaan kas perusahaan. Standar industri untuk Cash Turn Over adalah 10 kali. Rasio Perputaran Kas atau Cash Turn Over adalah rasio yang digunakan sebagai pengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar seluruh utang dan beban-beban yang terkait dengan penjualan perusahaan. Standarnya yaitu 10 kali. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

Standar Industri	10 Kali
------------------	---------

NO	NAMA PERUSAHAAN	CASH TURN OVER(10)				KESIMPULAN	
		2018	2019	2020	2021		
1	TELEKOM INDONESIA INTERNATIONAL	41,16	69,63	14,77	7,37	3	SEHAT
2	BALI TOWERINDO SENTRA	-2,14	-0,84	-2,69	-3,90	0	TIDAK SEHAT
3	EKA MAS REPUBLIK	-1,30	-1,25	-2,70	60,84	1	TIDAK SEHAT
4	MEGA AKSES PERSADA	0,98	0,78	2,57	8,48	0	TIDAK SEHAT
5	PSN ENAM INDONESIA	0,00	-3,78	6,41	3,04	0	TIDAK SEHAT
6	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	3,64	4,76	9,07	-18,73	0	TIDAK SEHAT
7	TELKOM SATELIT INDONESIA	1,57	7,02	4,77	3,43	0	TIDAK SEHAT
8	AGUNG GEMILANG PERKASA	1,82	3,92	2,00	0,42	0	TIDAK SEHAT
9	AKTIF TENGAH MALAM	100,70	13,96	5,93	6,41	2	SEHAT
10	ALITA PRAYA MITRA	16,68	8,03	-12,75	-8,37	2	SEHAT
11	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES	-7,78	-9,61	1,35	1,37	1	TIDAK SEHAT
12	BAKRIE TELECOM	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0	TIDAK SEHAT
13	BERDIKARI PRIMA MANDIRI	-2,07	-3,38	-12,85	64,88	1	TIDAK SEHAT
14	COMTELINDO	12,87	8,93	1,88	2,54	1	TIDAK SEHAT
15	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	-2,74	-2,35	-1,32	0,46	0	TIDAK SEHAT
16	DEWATA TELEMATIKA	-22,24	14,86	32,46	14,71	3	SEHAT
17	FASTEL SARANA INDONESIA	0,18	1,14	-24,41	-1,46	0	TIDAK SEHAT
18	FIRST MEDIA	-0,14	-0,00	-0,00	-0,00	0	TIDAK SEHAT
19	I FORTE GLOBAL INTERNET	-4,89	21,51	-13,10	8,56	1	TIDAK SEHAT
20	INTERNUX	-0,05	-0,00	-0,00	-0,00	0	TIDAK SEHAT
21	JALAWAVE CAKRAWALA	1,00	0,94	0,78	0,68	0	TIDAK SEHAT
22	MILLENIUM INTERNETINDO	5,87	3,40	4,16	2,56	0	TIDAK SEHAT
23	MNC KABEL MEDIACOM	85,59	-2,98	-2,82	29,49	2	SEHAT
24	PASIFIKTEL INDOTAMA	2,79	6,69	5,92	3,11	0	TIDAK SEHAT
25	PC24 CYBER INDONESIA	19,66	-4,29	-3,65	-12,38	1	TIDAK SEHAT
26	PRESTASI PIRANTI INFORMASI	-0,83	-0,41	-0,33	-0,34	0	TIDAK SEHAT
27	SERPONG MAS TELEMATIKA	2,59	6,91	-2,25	6,96	0	TIDAK SEHAT
28	TIME EXCELINDO	4,12	2,52	2,86	2,51	0	TIDAK SEHAT
29	TOWER BERSAMA DAN ENTITAS	-1,46	-75,12	-1,05	19,36	1	TIDAK SEHAT
30	UNINET MEDIA SAKTI	-0,52	-0,13	-0,60	-12,72	0	TIDAK SEHAT
31	VARNION TECHNOLOGY SEMESTA	0,00	2.725,66	- 153,40	11,61	2	SEHAT

Dalam data yang diberikan, terdapat informasi mengenai Cash Turn Over perusahaan-perusahaan yang tercantum. Rasio ini memberikan indikasi tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengelola kas mereka untuk membayar utang dan beban-beban yang terkait dengan penjualan.

Berdasarkan data Cash Turn Over, terlihat bahwa sebagian besar perusahaan memiliki kinerja yang tidak sehat dalam mengelola kas mereka. Banyak perusahaan yang memiliki Cash Turn Over negatif atau sangat rendah, menunjukkan rendahnya efisiensi pengelolaan kas mereka. Ini dapat menimbulkan masalah likuiditas dan kesulitan dalam membayar utang dan beban-beban yang terkait dengan penjualan.

Beberapa perusahaan yang menunjukkan Cash Turn Over negatif atau sangat rendah antara lain Bali Towerindo Sentra, Eka Mas Republik, Mega Akses Persada, PSN Enam Indonesia, Supra Primatama Nusantara, Telkom Satelit Indonesia, Agung Gemilang Perkasa, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini perlu memperbaiki manajemen kas mereka dan mencari cara untuk meningkatkan Cash Turn Over mereka agar lebih efisien.

Di sisi lain, beberapa perusahaan seperti Telekom Indonesia International, Aktif Tengah Malam, Alita Praya Mitra, dan Dewata Telematika menunjukkan Cash Turn Over yang relatif lebih baik dan mencapai standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini lebih efisien dalam mengelola kas mereka dan memiliki tingkat ketersediaan kas yang lebih baik untuk membayar utang dan beban-beban yang terkait dengan penjualan.

Berikut Skala Tidak Sehat:

NO	PERUSAHAAN	CASH TURN OVER (10)							
		Ket	2018	Ket	2019	Ket	2020	Ket	2021
1	TELEKOM INDONESIA INTERNATIONAL	SEHAT	41,16	SEHAT	69,63	SEHAT	14,77	R	7,37
2	BALI TOWERINDO SENTRA	SB	-2,14	SB	-0,84	SB	-2,69	SB	-3,90
3	EKA MAS REPUBLIK	SB	-1,30	SB	-1,25	SB	-2,70	SEHAT	60,84
4	MEGA AKSES PERSADA	SB	0,98	SB	0,78	B	2,57	SR	8,48
5	PSN ENAM INDONESIA	SB	0,00	SB	-3,78	R	6,41	B	3,04

6	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	B	3,64	S	4,76	SR	9,07	SB	- 18,73
7	TELKOM SATELIT INDONESIA	SB	1,57	R	7,02	S	4,77	B	3,43
8	AGUNG GEMILANG PERKASA	SB	1,82	B	3,92	B	2,00	SB	0,42
9	AKTIF TENGAH MALAM	SEHAT	100,70	SEHAT	13,96	R	5,93	R	6,41
10	ALITA PRAYA MITRA	SEHAT	16,68	SR	8,03	SB	-12,75	SB	-8,37
11	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES	SB	-7,78	SB	-9,61	SB	1,35	SB	1,37
12	BAKRIE TELECOM	SB	-0,00	SB	-0,00	SB	-0,00	SB	-0,04
13	BERDIKARI PRIMA MANDIRI	SB	-2,07	SB	-3,38	SB	-12,85	SEHAT	64,88
14	COMTELINDO	SEHAT	12,87	SR	8,93	SB	1,88	B	2,54
15	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	SB	-2,74	SB	-2,35	SB	-1,32	SB	0,46
16	DEWATA TELEMATIKA	SB	-22,24	SEHAT	14,86	SEHAT	32,46	SEHAT	14,71
17	FASTEL SARANA INDONESIA	SB	0,18	SB	1,14	SB	-24,41	SB	-1,46
18	FIRST MEDIA	SB	-0,14	SB	-0,00	SB	-0,00	SB	-0,00
19	I FORTE GLOBAL INTERNET	SB	-4,89	SEHAT	21,51	SB	-13,10	SR	8,56
20	INTERNUX	SB	-0,05	SB	-0,00	SB	-0,00	SB	-0,00
21	JALAWAVE CAKRAWALA	SB	1,00	SB	0,94	SB	0,78	SB	0,68
22	MILLENIUM INTERNETINDO	R	5,87	B	3,40	S	4,16	B	2,56
23	MNC KABEL MEDIACOM	SEHAT	85,59	SB	-2,98	SB	-2,82	SEHAT	29,49
24	PASIFIKTEL INDOTAMA	B	2,79	R	6,69	R	5,92	B	3,11
25	PC24 CYBER INDONESIA	SEHAT	19,66	SB	-4,29	SB	-3,65	SB	- 12,38
26	PRESTASI PIRANTI INFORMASI	SB	-0,83	SB	-0,41	SB	-0,33	SB	-0,34
27	SERPONG MAS TELEMATIKA	B	2,59	R	6,91	SB	-2,25	R	6,96
28	TIME EXCELINDO	S	4,12	B	2,52	B	2,86	B	2,51

29	TOWER BERSAMA DAN ENTITAS	SB	-1,46	SB	-75,12	SB	-1,05	SEHAT	19,36
30	UNINET MEDIA SAKTI	SB	-0,52	SB	-0,13	SB	-0,60	SB	- 12,72
31	VARNION TECHNOLOGY SEMESTA	SB	0,00	SEHAT	2.725,66	SB	- 153,40	SEHAT	11,61

Keterangan:

SR	Sangat Ringan	8,1 – 9,9
R	Ringan	6,1 – 8,0
S	Sedang	4,1 – 6,0
B	Berat	2,1 – 4,0
SB	Sangat Berat	< 2

Cash Turn Over merupakan indikator penting untuk mengukur efisiensi pengelolaan kas perusahaan. Perusahaan-perusahaan dengan Cash Turn Over yang rendah atau negatif perlu melakukan perbaikan dalam manajemen kas mereka untuk menghindari masalah likuiditas. Upaya seperti meningkatkan arus kas, mengoptimalkan modal kerja, dan mengelola utang dengan lebih efisien dapat membantu meningkatkan Cash Turn Over perusahaan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik industri masing-masing perusahaan dalam melakukan analisis Cash Turn Over. Rasio ini sebaiknya digunakan bersama dengan analisis rasio keuangan lainnya dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kesehatan keuangan dan kinerja operasional perusahaan.

BAGIAN IV: KAJIAN KERINGANAN PNBP

Keringanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan atau pengurangan beban finansial kepada perusahaan atau entitas tertentu, dalam hal ini operator telekomunikasi. Dalam bagian ini, dilakukan analisis proses pengajuan keringanan PNBP dan potensi dampaknya bagi operator telekomunikasi di Indonesia.

4.1 Proses Pengajuan Keringanan PNBP

Proses pengajuan keringanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk operator telekomunikasi di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keringanan PNBP. Peraturan ini memberikan kerangka kerja dan prosedur yang harus diikuti oleh operator telekomunikasi yang ingin mengajukan keringanan PNBP. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses pengajuan keringanan PNBP berdasarkan peraturan tersebut:

1) **Persiapan Dokumen.**

Operator telekomunikasi yang berminat mengajukan keringanan PNBP perlu melakukan persiapan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020. Dokumen yang umumnya diperlukan antara lain adalah:

- a) Surat permohonan keringanan PNBP yang ditujukan kepada instansi terkait.
- b) Laporan keuangan terakhir operator telekomunikasi.
- c) Rencana bisnis atau proyeksi keuangan yang mendukung permohonan keringanan PNBP.
- d) Bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan dengan pengajuan keringanan PNBP.

2) **Pengajuan Permohonan.**

Setelah dokumen persiapan lengkap, operator telekomunikasi dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP ke instansi terkait sesuai dengan aturan yang berlaku. Permohonan ini biasanya diajukan secara tertulis dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang telah disiapkan sebelumnya.

3) **Evaluasi Permohonan.**

Instansi terkait akan melakukan evaluasi terhadap permohonan keringanan PNBPN yang diajukan oleh operator telekomunikasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan pemeriksaan dokumen, analisis keuangan, dan pertimbangan lain yang relevan.

4) Keputusan dan Pemberitahuan.

Setelah proses evaluasi selesai, instansi terkait akan mengambil keputusan terkait pengajuan keringanan PNBPN. Keputusan tersebut dapat berupa persetujuan penuh, persetujuan dengan syarat, atau penolakan. Operator telekomunikasi akan diberitahukan mengenai keputusan tersebut melalui pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pemohon.

5) Pelaksanaan Keringanan PNBPN.

Apabila permohonan keringanan PNBPN disetujui, operator telekomunikasi harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan menjalankan kewajiban yang terkait dengan keringanan yang diberikan. Hal ini meliputi pembayaran PNBPN yang telah dikurangi atau ditangguhkan, pelaporan berkala terkait penggunaan keringanan, dan pemenuhan syarat-syarat lain yang ditetapkan.

6) Monitoring dan Evaluasi.

Instansi terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan keringanan PNBPN oleh operator telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keringanan PNBPN yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang diharapkan. Proses monitoring dan evaluasi ini melibatkan pemeriksaan laporan keuangan, audit, serta verifikasi terhadap penggunaan keringanan PNBPN oleh operator telekomunikasi.

7) Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Operator telekomunikasi yang mendapatkan keringanan PNBPN wajib melaporkan secara berkala mengenai penggunaan keringanan tersebut kepada instansi terkait. Pelaporan ini mencakup informasi mengenai penggunaan keringanan PNBPN, dampak yang dicapai, serta pemenuhan kewajiban lain yang terkait. Selain itu, operator telekomunikasi juga bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan informasi yang dilaporkan.

8) Pemantauan dan Pengawasan.

Instansi terkait akan melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap operator telekomunikasi yang telah mendapatkan keringanan PNBP. Tujuan dari pemantauan dan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa operator telekomunikasi mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan melaksanakan kewajiban yang terkait dengan keringanan yang diberikan. Apabila terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan, instansi terkait berhak mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pengajuan keringanan PNBP bagi operator telekomunikasi di Indonesia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020. Dalam proses ini, operator telekomunikasi perlu mempersiapkan dokumen yang lengkap, mengajukan permohonan secara tertulis, menjalani proses evaluasi, dan mematuhi kewajiban yang terkait dengan keringanan PNBP yang diberikan. Monitoring, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan keberhasilan penggunaan keringanan PNBP. Dengan adanya proses yang terstruktur dan transparan ini, diharapkan keringanan PNBP dapat memberikan dampak yang positif bagi operator telekomunikasi dan mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia.

4.2 Potensi Dampak Keringanan PNBP bagi Operator Telekomunikasi

Pemberian keringanan PNBP memiliki potensi dampak yang signifikan bagi operator telekomunikasi, baik dari segi keuangan maupun operasional. Potensi dampak positif meliputi:

1) Pengurangan beban finansial

Operator telekomunikasi akan mengalami pengurangan jumlah pembayaran PNBP yang harus mereka lakukan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan likuiditas perusahaan.

2) Peningkatan investasi

Dengan adanya keringanan PNBP, operator telekomunikasi memiliki peluang untuk mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran PNBP ke investasi dalam pengembangan jaringan, teknologi baru, atau inovasi layanan, yang dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perusahaan.

3) Mendorong ekspansi geografis

Dengan beban finansial yang lebih ringan melalui keringanan PNBP, operator telekomunikasi dapat memperluas jangkauan geografis layanan mereka ke daerah yang sebelumnya tidak

terjangkau. Ini dapat meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi di wilayah-wilayah terpencil atau terpinggirkan, sehingga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.

4) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan

Operator telekomunikasi dapat menggunakan keuntungan dari keringanan PNBPN untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan telekomunikasi yang ditawarkan kepada pelanggan, seperti peningkatan kecepatan internet, kualitas panggilan, dan pengembangan layanan inovatif seperti Internet of Things (IoT) atau 5G.

5) Mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan

Dengan keringanan PNBPN, operator telekomunikasi memiliki kesempatan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke bidang penelitian dan pengembangan (R&D). Hal ini dapat mendorong inovasi teknologi dan pengembangan solusi baru yang menguntungkan industri telekomunikasi secara keseluruhan.

6) Meningkatkan daya saing

Dengan memanfaatkan keringanan PNBPN dengan bijak, operator telekomunikasi dapat meningkatkan daya saing mereka dalam industri yang semakin kompetitif. Keuntungan finansial yang diperoleh dapat digunakan untuk investasi strategis yang memperkuat posisi perusahaan dalam pasar, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Meskipun keringanan PNBPN dapat memberikan manfaat bagi operator telekomunikasi, ada juga beberapa potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan:

1) Ketergantungan terhadap keringanan PNBPN

Operator telekomunikasi yang terlalu mengandalkan keringanan PNBPN untuk membiayai kegiatan operasional mereka dapat menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Jika keringanan PNBPN dihapus atau dikurangi di masa depan, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan finansial yang signifikan.

2) Pengaruh terhadap pendapatan negara

Pemberian keringanan PNBPN kepada operator telekomunikasi dapat berdampak pada pendapatan negara. Jika keringanan PNBPN diberikan dalam skala besar atau dalam jangka

waktu yang panjang, hal ini dapat mengurangi pendapatan negara yang seharusnya diperoleh dari sektor telekomunikasi.

3) Pengaruh terhadap persaingan pasar

Jika hanya sebagian operator telekomunikasi yang mendapatkan keringanan PNBP, hal ini dapat mengganggu persaingan pasar yang sehat. Operator yang tidak mendapatkan keringanan PNBP mungkin mengalami kesulitan bersaing dengan pesaing mereka yang mendapatkan keringanan PNBP. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan dan membatasi kesempatan bagi operator telekomunikasi yang lebih kecil atau baru untuk tumbuh dan berkembang.

BAGIAN V: REKOMENDASI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

5.1 Rekomendasi untuk Operator Telekomunikasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada operator telekomunikasi terkait penerapan keringanan PNBP dan upaya meningkatkan kinerja operasional. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain:

1) Optimalisasi Penggunaan Keringanan PNBP

Operator telekomunikasi perlu memastikan bahwa mereka memanfaatkan keringanan PNBP secara optimal dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi pemenuhan kewajiban yang terkait dengan keringanan yang diberikan, pelaporan yang akurat dan tepat waktu, serta transparansi dalam penggunaan keringanan tersebut.

2) Diversifikasi Sumber Pendapatan

Operator telekomunikasi sebaiknya mengadopsi strategi diversifikasi sumber pendapatan guna mengurangi ketergantungan pada PNBP dan menghadapi risiko potensial di masa depan. Diversifikasi sumber pendapatan dapat dilakukan melalui pengembangan layanan baru, inovasi produk, kolaborasi dengan mitra strategis, dan eksplorasi peluang bisnis yang baru.

3) Peningkatan Efisiensi Operasional

Operator telekomunikasi perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien, pengelolaan sumber daya yang optimal, pengendalian biaya operasional, dan perbaikan proses bisnis secara keseluruhan. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, operator telekomunikasi dapat mengurangi beban keuangan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

4) Fokus pada Pengalaman Pelanggan

Operator telekomunikasi perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada pengalaman pelanggan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kecepatan dan kualitas jaringan, menyediakan inovasi produk dan layanan yang relevan, serta memberikan pelayanan yang responsif dan personal kepada pelanggan. Dengan meningkatkan pengalaman pelanggan, operator telekomunikasi dapat memperkuat loyalitas pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

5.2 Rekomendasi untuk Kominfo

Selain rekomendasi yang ditujukan kepada operator telekomunikasi, terdapat pula rekomendasi yang dapat diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan keringanan PNBP dan mendukung perkembangan industri telekomunikasi. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain:

1) Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi

Kominfo perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan operator telekomunikasi untuk memastikan pemahaman yang jelas terkait dengan ketentuan dan mekanisme penerapan keringanan PNBP. Hal ini termasuk penyampaian informasi yang tepat waktu, pengklarifikasian aturan, dan pemberian arahan yang jelas terkait dengan implementasi keringanan PNBP. Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif, Kominfo dapat memastikan operator telekomunikasi dapat menerapkan keringanan PNBP dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif

Kominfo perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan keringanan PNBP oleh operator telekomunikasi. Hal ini meliputi pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban yang terkait dengan keringanan, pelaporan yang akurat, dan penggunaan keringanan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Kominfo juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak keringanan PNBP terhadap operator telekomunikasi dan sektor industri secara keseluruhan.

3) Pembinaan dan Dukungan Industri

Kominfo dapat memberikan pembinaan dan dukungan yang lebih aktif kepada operator telekomunikasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan di sektor industri. Hal ini meliputi penyediaan informasi dan panduan terkait strategi pengembangan bisnis, inovasi produk, penggunaan teknologi baru, serta peluang kerjasama dan investasi yang dapat memperkuat posisi operator telekomunikasi di pasar.

4) Fasilitasi Inovasi dan Digitalisasi

Kominfo perlu mendorong operator telekomunikasi untuk mengadopsi inovasi dan mempercepat proses digitalisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan kebijakan yang mendukung, kolaborasi dengan sektor lain (seperti industri teknologi), dan fasilitasi akses

terhadap teknologi dan infrastruktur yang diperlukan. Dengan mendorong inovasi dan digitalisasi, operator telekomunikasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan layanan yang lebih baik, dan menghadapi persaingan yang lebih baik.

5.3 Strategi Implementasi Rekomendasi

Untuk mengimplementasikan rekomendasi yang telah disebutkan di atas, diperlukan strategi yang komprehensif dan terencana. Beberapa strategi implementasi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pengembangan Kebijakan Dukungan: Kominfo perlu mengembangkan kebijakan dukungan yang mendukung implementasi rekomendasi untuk operator telekomunikasi. Hal ini meliputi penyusunan kebijakan yang memfasilitasi diversifikasi sumber pendapatan, pengembangan layanan baru, kolaborasi industri, dan inovasi teknologi. Kebijakan tersebut juga dapat mencakup insentif fiskal, pembebasan pajak, atau fasilitas pendanaan yang mendukung transformasi digital dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Kominfo perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi rekomendasi yang telah diberikan. Hal ini akan membantu dalam menilai efektivitas rekomendasi, mengidentifikasi tantangan yang muncul, dan mengadopsi tindakan perbaikan jika diperlukan. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga memungkinkan untuk memantau dampak rekomendasi terhadap operator telekomunikasi dan sektor industri secara keseluruhan.
- 3) Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Kominfo dapat mendorong kolaborasi aktif antara operator telekomunikasi, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini dapat berupa pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik, serta mengidentifikasi peluang kerjasama dalam pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi.

Melalui implementasi strategi yang tepat, rekomendasi yang disampaikan kepada operator telekomunikasi dan Kominfo dapat membantu meningkatkan kinerja operasional operator telekomunikasi, memperkuat posisi mereka di pasar, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor telekomunikasi secara keseluruhan.

BAGIAN VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan Kajian

Dalam kajian ini, telah dilakukan analisis mendalam terkait dengan keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku bagi operator telekomunikasi di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, beberapa kesimpulan dapat diambil:

- 1) Keringanan PNBP memberikan dampak signifikan bagi operator telekomunikasi, terutama dalam mengurangi beban biaya operasional dan memperkuat daya saing di pasar telekomunikasi.
- 2) Penerapan keringanan PNBP telah memberikan insentif bagi operator telekomunikasi untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik, menyediakan layanan yang lebih inovatif, dan meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi di seluruh Indonesia.
- 3) Meskipun keringanan PNBP memberikan manfaat yang signifikan, masih ada beberapa keterbatasan dan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan kebijakan ini.

6.2 Keterbatasan dan Peluang Kajian Selanjutnya

Meskipun kajian ini telah memberikan wawasan yang berharga, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dan peluang untuk penelitian selanjutnya:

- 1) Keterbatasan Data: Kajian ini terbatas pada data yang tersedia pada saat ini. Data terbaru dan lebih terperinci dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak keringanan PNBP pada operator telekomunikasi.
- 2) Evaluasi Dampak: Kajian ini belum melibatkan evaluasi dampak yang menyeluruh terkait dengan penerapan keringanan PNBP. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengukur dampak secara kuantitatif dan kualitatif, termasuk peningkatan pendapatan, pertumbuhan pelanggan, dan peningkatan kualitas layanan.
- 3) Analisis Komparatif: Sebuah studi perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan keringanan PNBP dapat memberikan perspektif yang berharga dalam membandingkan efektivitas kebijakan tersebut.

- 4) Kajian Kelayakan: Studi lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan dan keberlanjutan keringanan PNBP dalam jangka panjang, serta mempertimbangkan implikasi ekonomi, keuangan, dan sosial.

Dengan memperhatikan keterbatasan dan peluang tersebut, penelitian dan kajian selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi keringanan PNBP dan manfaatnya bagi operator telekomunikasi serta sektor telekomunikasi secara keseluruhan.